



PEMERINTAH  
KABUPATEN LEBAK



# PPAS

PRIORITAS DAN  
PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA

2025



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 910/Perj.648-BKAD/2024  
NOMOR : 178/310-DPRD/2024  
TANGGAL : 1 Agustus 2024

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Rangkasbitung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IWAN KURNIAWAN, S.T., M.M.  
Jabatan : Pj. Bupati Lebak  
Alamat Kantor : Jln. Abdi Negara Nomor 03 Rangkasbitung.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : UCUY MASYHURI SAJIM, S.Pd.I.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak  
Alamat Kantor : Jln. Abdi Negara Nomor 08 Rangkasbitung  
  
b. Nama : JUNAEDI IBNU JARTA, S.Hut.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak  
Alamat Kantor : Jln. Abdi Negara Nomor 08 Rangkasbitung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025, yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Lebak, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun

Anggaran 2025, PARA PIHAK sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pj. BUPATI LEBAK  
Selaku  
PIHAK PERTAMA



IWANKURNIAWAN, S.T., M.M.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN LEBAK

Selaku,  
PIHAK KEDUA



UCUY, MASYKURI SAJIM, S.Pd.I  
WAKIL KETUA

JUNAEDI IBNU JARTA, S.Hut.  
WAKIL KETUA



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
DAFTAR TABEL .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan .....	5
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS .....	5
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....	10
2.1 Rencana Pendapatan Daerah .....	11
2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah .....	14
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH .....	16
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN .....	61
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	61
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan sub kegiatan	67
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer .....	171
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .....	175
BAB VI PENUTUP.....	177

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 .....	12
Tabel 2.2	Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.....	15
Tabel 3.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 .....	26
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Belanja Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025.....	61
Tabel 4.2	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.. ..	68
Tabel 4.3	Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	171
Tabel 5.1	Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.....	176



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan. Mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 belum terbit, maka dokumen PPAS Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025.

Rancangan KUA bersama dengan rancangan PPAS disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Kesepakatan KUA dan PPAS. Selanjutnya Kesepakatan KUA dan PPAS tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPKD) dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran.

PPAS disusun dengan tahapan :

- 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- 3) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.



PPAS Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan kemampuan rencana pendapatan dan pembiayaan serta diuraikan menurut prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta Perangkat Daerah yang melaksanakan. Selain itu, prioritas pembangunan dipilah menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dijabarkan ke dalam berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait.

PPAS akan memuat rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, serta rencana pembiayaan daerah. Adapun rumusan prioritas yang tercantum dalam PPAS Tahun 2025 difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan target capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025. Belanja daerah tahun 2025 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dengan fokus pada pemenuhan belanja urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, belanja yang bersifat wajib dan mengikat, belanja mandatory sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan belanja prioritas dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.



## 1.2 Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tujuan:

1. Sinkronisasi dan keterpaduan program, kegiatan dan sub kegiatan Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang didasarkan atas Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Perangkat Daerah dengan pagu maksimal pada setiap rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati.

## 1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Lebak Tahun 2025 disusun berdasarkan aturan dan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang



- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;



26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
30. Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.

**BAB II****RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah bagi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah berasal dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang oleh daerah melalui kas daerah yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Oleh karenanya, fluktuasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap kelompok, jenis dan objek pendapatan tersebut.

Sementara penerimaan pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah disusun berdasarkan data potensi pendapatan daerah dengan memperhitungkan capaian realisasi 3 (tiga) tahun terakhir serta perkiraan kondisi ekonomi makro di tahun 2024.

## 2.1 Rencana Pendapatan Daerah

Secara total rencana pendapatan daerah di tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.2.257.418.399.284,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.536.655.154.722,- dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.669.215.302.962,- serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.51.547.941.600,- sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**RENCANA PENERIMAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.257.418.399.284</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>536.655.154.722</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	264.894.941.672	Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.1.02	Retribusi Daerah	264.122.651.210	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.637.561.840	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000.000	
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.669.215.302.962</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.546.465.505.000	



KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	122.749.797.962	
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>51.547.941.600</b>	
4.3.01	Pendapatan Hibah	51.547.941.600	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.257.418.399.284</b>	

Berdasarkan tabel tersebut diatas target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.536.655.154.722,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.264.894.941.672,- dengan kontribusi terbesar berasal dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.59.000.000.000,- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.52.653.941.672,- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.45.000.000.000,- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.36.000.000.000,- Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.31.000.000.000,- dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp.30.000.000.000,-.
- b. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.264.122.651.210,- dengan kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp.160.000.000.000,- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp.79.986.427.824,- Retribusi Pelayanan Pasar (Jasa Penitipan Kendaraan, Retribusi Los dan Retribusi Kios) sebesar Rp.8.821.742.000,- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar



- Rp.8.000.000.000,- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp.1.605.589.336,- Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan sebesar Rp.1.393.750.000,- dan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Retribusi Penyewaan Bangunan Toko, Kios dan Shelter Pasar) sebesar Rp.1.238.855.250,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.6.637.561.840,- yang berasal dari deviden bjb cabang Rangkasbitung sebesar Rp.4.202.272.036,- deviden PD. BPR Lebak Sejahtera sebesar Rp.1.916.119.241,- dan deviden PT. LKM Rangkasbitung sebesar Rp.519.170.563,-.
- d. Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan sebesar Rp.1.000.000.000,- yang berasal dari jasa giro pada kas daerah.

Selanjutnya untuk pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Lebak merencanakan sebesar Rp.1.669.215.302.962,- yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.546.465.505.000,- dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.122.749.797.962,-. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dialokasikan sesuai dengan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.66.852.645.000,-
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.132.207.217.000,-
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik belum dialokasikan, menunggu dialokasikan dalam APBN.



- d. Dana Insentif Daerah (DID) belum dialokasikan dan menunggu dialokasikan dalam APBN, dan
- e. Dana Desa (DD) sebesar Rp.347.405.643.000,-.

Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten dialokasikan sebesar Rp.122.749.797.962,- sementara untuk Bantuan Keuangan Provinsi Banten belum dianggarkan karena harus menunggu dialokasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

Penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.51.547.941.600,- yang berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).

## **2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam PPAS Tahun 2025 tidak mengalokasikan atas penerimaan pembiayaan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.2**  
**Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan**  
**Tahun Anggaran 2025**

<b>KODE</b>	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>DASAR HUKUM</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	



### **BAB III**

## **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Belanja Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah dapat digunakan untuk berbagai keperluan serta pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti pelaksanaan pelayanan dasar seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, penyediaan layanan publik, belanja pegawai, dan lain sebagainya. Penting bagi belanja daerah memiliki dasar hukum yang kuat agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Belanja daerah yang dianggarkan untuk pemenuhan prioritas untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2025 memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pertumbuhan



ekonomi daerah dengan memperhatikan target capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025. Belanja daerah tahun 2025 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dengan fokus pada pemenuhan belanja urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, belanja yang bersifat wajib dan mengikat, belanja mandatory sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan belanja prioritas dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan diantaranya melalui:

1. Pemenuhan pelayanan dasar terutama Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang lebih adaptif.
2. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan pengembangan pariwisata dan pusat-pusat produksi.
3. Pemenuhan tematik pembangunan seperti penanganan kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting, Penanganan Inflasi dan kemudahan berinvestasi dalam berusaha.
4. Pembangunan Infrastruktur pengelolaan sampah dan pengembangan pariwisata geopark bayah dome dan agrowisata cikapek.
5. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman, Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial).
6. Meningkatkan kualitas layanan publik yang mampu mendorong kemudahan investasi maupun pertumbuhan kewirausahaan pada sektor riil.
7. Pada RKPD memperhitungkan untuk pemenuhan Gaji dan Tunjangan sebanyak 634 Orang diantaranya Formasi CPNS sebanyak 84 Orang terdiri dari Tenaga Kesehatan sebanyak 21 Orang dan Tenaga Teknis sebanyak 63 Orang. Formasi PPPK sebanyak 550 Orang terdiri dari Tenaga Pendidikan sebanyak 131 Orang,



Tenaga Kesehatan sebanyak 110 Orang serta Tenaga Teknis sebanyak 309 Orang sebagaimana Surat Bupati Lebak usul rincian formasi ASN pengadaan Tahun 2024 untuk kebutuhan selama 14 bulan.

8. Pemenuhan Belanja Bantuan Keuangan pada Partai Politik yang sebesar Rp.3.500 per surat suara sah atas hasil perhitungan suara hasil pemilihan Legislatif.

Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, belanja daerah Tahun 2025 juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa mendorong pengalokasian belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mandatory spending), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan (minimal 20% dari total belanja daerah), fungsi kesehatan, Infrastruktur Pelayanan Publik (40% dari pendapatan daerah yang diterima dari Dana Transfer Umum), Fungsi pengawasan (0,50%) diluar belanja gaji, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (0,16%), Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 905/117/SJ tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sementara pemenuhan belanja yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi akan dialokasikan setelah Pemerintah Provinsi mencantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Banten.



Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi RPJMN Tahun 2025-2029, sehingga Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 akan diintegrasikan dengan visi, dan misi presiden terpilih. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 menetapkan tema pembangunan tahun 2025 dengan Tema "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dengan 8 (delapan) arah kebijakan prioritas pembangunan nasional meliputi:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.



Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- I. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).** Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkokoh ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui:
  - a. penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara;
  - b. pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme;
  - c. pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z;
  - d. internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.
  
- II. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.** Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dilakukan melalui:
  - a. meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI;
  - b. memperkuat komponen Cadangan;
  - c. meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara;
  - d. memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber;



- e. melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum *essential force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI;
- f. meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar;
- g. memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme;
- h. peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit;
- i. pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.

**III. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.** Arah kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui:

- a. membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah;
- b. menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu;
- c. menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi;
- d. mengembangkan pelabuhan simpul transshipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik;



- e. membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah;
- f. memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat.

**IV. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.**

Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, diarahkan untuk:

- a. memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi;
- c. memperkuat Sistem Kesehatan Nasional;
- d. menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
- e. meningkatkan Prestasi Olahraga.



- V. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.** Dalam mewujudkan sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada:
- pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru;
  - penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional;
  - pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.
- VI. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.** Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan antara lain:
- Arah kebijakan membangun desa dan membangun dari desa;
  - Arah kebijakan pemerataan ekonomi;
  - Memberantas kemiskinan Strategi dalam mendukung arah kebijakan pemberantasan kemiskinan di tahun 2025.
- VII. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.** Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional di tahun 2025, arah kebijakan dilaksanakan melalui:
- reformasi politik;
  - reformasi hukum;
  - reformasi tata Kelola pemerintahan;
  - pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan;
  - penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.



**VIII. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang difokuskan pada:**

- a. masyarakat adil, makmur, dan harmonis;
- b. melestarikan budaya;
- c. penanganan bencana.

Sedangkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025 menetapkan dengan Tema "***Pembangunan Kolaborasi yang inklusif memperkuat masyarakat Banten yang modern dalam rangka mencapai Banten yang Sejahtera, mandiri dan berdaya saing***" yang menetapkan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah yang meliputi:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten serta Nasional, penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dengan memperhatikan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yaitu "***Pembangunan kolaboratif yang inklusif menuju Masyarakat Lebak yang lebih mandiri dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan***" dengan 4 (empat)



prioritas pembangunan yang diarahkan untuk mendukung dan mewujudkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas.

Dinamika yang berkembang dan perkiraan ke depan menjadi bagian utama yang mendasari penyusunan dokumen KUA untuk tahun 2025 sebagai arah kebijakan untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan serta mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang dimulai RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan pondasi transformasi. Selain itu, identifikasi tantangan dan peluang yang ingin dicapai juga menjadi bagian yang penting karena dipengaruhi oleh proses transisi pemerintahan yang sedang berjalan dalam melanjutkan visi dan misi kepemimpinan presiden terpilih dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang berdampak pada bagaimana menjaga keberlanjutan keuangan negara kepada daerah dari sisi Dana Perimbangan berupa Transfer Pusat. Adapun Komitmen Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Satgas PAD secara Optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lebak.

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas mengenai perwujudan Prioritas Pembangunan pada Tahun 2025, maka dokumen PPAS ini akan menguraikan sinkronisasi pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten Tahun 2025, serta berbagai sasaran dari setiap Prioritas dan Perangkat Daerah pelaksana program sebagaimana tabel prioritas pembangunan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2025**

Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	644.548.097.973	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	50.716.458.012	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Rata-rata persentase capaian SPM Sekolah	Dinas Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.000.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Persentase guru bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	141.869.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Persentase Minat baca masyarakat	Dinas Pendidikan



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	152.689.822.265	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	42.886.673.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.578.809.124	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Rasio Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan terhadap jumlah penduduk	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	60.000.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	80.000.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Cakupan Upaya Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
		serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000.000	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	RSUD Dr. ADJIDARMO
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78.673.130.994	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	42 puskesmas
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.284.957.511	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	5.628.820.350	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.450.680.750	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P.Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	15.000.000.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Masyarakat di Kabupaten Lebak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.181.191.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Persentase akses sanitasi (air limbah)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	400.000.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Persentase akses drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	375.000.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Dokumen Rencana Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan	29.616.104.500	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
		syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	206.136.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase terpenuhinya layanan jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	215.260.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Dokumen Rencana Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	669.794.935	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	UPTD Alat berat dan Perbengkelan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	368.294.000	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	UPTD Laboratorium
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.764.587.719	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
Program Pengembangan Perumahan	219.309.900	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan	Masyarakat Korban Bencana	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
		ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan		Permukiman Serta Pertanian
Program Kawasan Permukiman	1.714.079.900	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanian
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	50.000.000	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	PSU Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanian
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	49.999.900	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Tanah Garapan yang Bersengketa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanian
Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	149.999.900	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Tanah Negara	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.702.703.436	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	404.116.600	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Masyarakat, Bupati/Wakil Bupati dan Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Lebak	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	115.601.900	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.486.576.776	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanggulangan Bencana	1.705.789.440	PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penanggulangan korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.912.354.716	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	440.660.000	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya	Meningkatnya pelayanan dan kemampuan	Dinas Sosial



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
		ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Kualitas Sumber Daya Manusia	saing Sumber Daya Manusia	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	9.000.000	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pelayanan dan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	452.690.000	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pelayanan dan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.631.933.700	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pelayanan dan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	170.130.000	PN 8. Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan dan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	8.712.000	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pelayanan dan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Dinas Sosial



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.631.604.880	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	43.000.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Balai Latihan Kerja Komunitas	Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	457.000.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Pencari Kerja	Dinas Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	217.010.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Perusahaan, Pekerja, Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	563.083.600	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang	Pencari Kerja, Tenaga Kerja	UPTD Latihan Kerja



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
		serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		inklusif dan berkelanjutan		
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	180.000.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Pemerintah Daerah (OPD) dan Mitra Kerja (Swasta)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Perempuan	80.000.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Korban Kasus Kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	114.000.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Kelompok Anak, Perangkat Daerah, Relawan SAPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Khusus Anak	150.000.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya	Kelompok Anak, Sekolah, Perangkat Daerah,	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
		olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Kualitas Sumber Daya Manusia	saing Sumber Daya Manusia	Mitra Kerja (Swasta)	Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.032.123.294	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Program Pengendalian Penduduk	20.000.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Penyuluh KB, TPK, Kelompok Tribina, Akseptor, dll	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	81.000.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Penyuluh KB, TPK, Kelompok Tribina, Akseptor, dll	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	50.000.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Kelompok Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Tim Pendamping Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.286.938.727	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	100.000.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Indeks Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	529.999.900	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Indeks Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	75.000.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Indeks Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
		syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
Program Pengawasan Keamanan Pangan	74.987.500	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Indeks Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.230.353.464	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	20.000.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Kabupaten Lebak	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	792.836.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Kabupaten Lebak	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	150.000.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Kabupaten Lebak	Dinas Lingkungan Hidup



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
		syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	30.599.800	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Cemaran Ringan	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	84.850.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Kabupaten Lebak	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	25.000.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Lebak	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.000.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Lebak	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	54.914.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah	Masyarakat Kabupaten Lebak	Dinas Lingkungan Hidup



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
		bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	yang baik, bersih dan berwibawa	Daerah yang berkualitas		
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	47.300.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Masyarakat Kabupaten Lebak	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	42.606.003.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Pengangkutan Sampah Perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	1.082.490.400	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Pengangkutan Sampah Perkotaan	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	656.056.400	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cemaran Ringan	UPTD Laboratorium Lingkungan



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.940.686.907	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk	85.000.000	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Prosentase Kepemilikan dokumen kependudukan	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	85.000.000	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Prosentase kepemilikan akta-akta catatan sipil	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90.000.000	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Prosentase Kesesuaian database dokumen kependudukan	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.388.620.602	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penataan Desa	71.002.400	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	P. Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Prosentase lembaga pemberdayaan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	24.790.200	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan	Prosentase lembaga	Dinas Pemberdayaan



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
		ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	pemberdayaan masyarakat	Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.524.983.500	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang memiliki kompetensi.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	582.299.500	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Prosentase lembaga pemberdayaan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.625.219.846	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	3.706.570.550	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.773.828.057	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	718.474.600	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	894.206.500	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kab. Lebak	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	495.226.600	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan teknologi informatika untuk layanan publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	59.840.100	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan data dan informasi urusan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.748.726.011	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	50.000.000	PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Jumlah Koperasi Sehat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	50.000.000	PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Prosentase UMK yang Aktif dan Kompetitif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	40.000.000	PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Prosentase UMK yang Aktif dan Kompetitif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Ukm)	200.000.000	PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	P. Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap	Prosentase UMK yang Aktif dan Kompetitif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
		kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	pembangunan yang berkelanjutan	menjaga kualitas lingkungan hidup		
Program Pengembangan Umkm	250.000.000	PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	P. Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Prosentase UMK yang Aktif dan Kompetitif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.649.101.756	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	9.999.800	PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	41.120.000	PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Pelayanan Penanaman Modal	38.380.000	PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	101.700.000	PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5.720.000	PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Prosentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.584.210.090	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Kepemudaan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	819.389.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P. Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P. Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Prosentase Kelembagaan Pemuda yang Aktif	Dinas Kepemudaan Olahraga
Program Pengembangan	4.454.587.950	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	P. Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan	P. Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya	Prosentase Kelembagaan	Dinas Kepemudaan Olahraga



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Kualitas Sumber Daya Manusia	saing Sumber Daya Manusia	Olahraga yang Aktif	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	75.000.000	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Prosentase Pengembangan Kepramukaan	Dinas Kepemudaan Olahraga
Program Pengembangan Kebudayaan	75.000.000	PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Masyarakat Adat/Umum	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	112.500.000	PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Masyarakat/pelaku kesenian tradisional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	250.000.000	PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Pengelola Cagar Budaya dan Museum, Masyarakat Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Pengelolaan Permuseuman	100.000.000	PN 8. Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Masyarakat dan Museum	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.851.639.200	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	10.800.000.000	PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Destinasi Wisata dan SDM Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	1.255.101.000	PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Destinasi Wisata dan SDM Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	310.000.000	PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	P. Prov 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	P. Kab 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pembinaan Perpustakaan	320.405.500	PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	P.Prov 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	P.Kab 1: Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Persentase pengelolaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.328.795.536	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengelolaan Arsip	123.998.500	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Persentase pengelolaan kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.993.533.185	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Perikanan



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	190.186.800	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Nelayan	Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	491.408.900	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Pembudidaya Ikan	Dinas Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.837.300	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Pelaku Usaha Perikanan	Dinas Perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	20.000.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P. Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Pengolah Pemasar Ikan	Dinas Perikanan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.740.372.232	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Pertanian



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.257.000.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Kelompok Tani dan Stekholder sektor pertanian di Kabupaten Lebak	Dinas Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	30.000.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Kelompok Tani dan Stekholder sektor pertanian di Kabupaten Lebak	Dinas Pertanian
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	70.000.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Kelompok Tani dan Stekholder sektor pertanian di Kabupaten Lebak	Dinas Pertanian
Program Perizinan Usaha Pertanian	74.999.800	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Kelompok Tani dan Stekholder sektor pertanian di Kabupaten Lebak	Dinas Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	499.000.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Kelompok Tani dan Stekholder sektor pertanian di Kabupaten Lebak	Dinas Pertanian



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
		syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.764.194.777	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	549.883.030	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	70.000.000	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Persentase Penanganan Penyakit Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Penyuluhan Pertanian	88.981.116	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	P.Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Persentase Penanganan Penyakit Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.108.588.122	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.180.456.900	PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	P. Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Prosentase Sarana Perdagangan yang Representative	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.168.378.400	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Prosentase Sarana Perdagangan yang Representative	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	217.609.900	PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	P. Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Prosentase Jumlah Penanganan Terhadap Pelanggaran Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	29.389.800	PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	P. Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki Standar Mutu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	165.684.900	PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	P. Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Prosentase Jumlah Penanganan Terhadap Pelanggaran Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	77.861.300	PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	P. Prov 3: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung	P. Kab 3: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap	Prosentase Jumlah Penanganan Terhadap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
		untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	pembangunan yang berkelanjutan	menjaga kualitas lingkungan hidup	Pelanggaran Perdagangan	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.178.566.110	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11.899.999.200	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Terjalannya kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga lain	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	1.350.000.000	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Terjalannya kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga lain	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.153.821.931	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	24.467.511.220	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Persentase terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.583.331.063	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.452.483.700	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Bapelitbangda Kabupaten Lebak	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.264.004.600	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Bapelitbangda Kabupaten Lebak	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	899.999.900	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Bapelitbangda Kabupaten Lebak	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.146.880.521	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	515.827.933.532	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	OPD di Kabupaten Lebak	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.174.990.200	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Prosentase Jumlah aset yang sesuai dengan total seluruh aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten lebak	Badan Keuangan dan Aset Daerah



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.072.775.152	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Badan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.349.999.900	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	ASN dan TKS Lingkup Bapenda Kab. Lebak	Badan Pendapatan Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.910.106.467	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah	1.391.503.200	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Jumlah SDM aparatur yang memiliki kompetensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.021.878.100	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah	Jumlah SDM aparatur yang memiliki kompetensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
		dan pemberantasan korupsi dan narkoba		Daerah yang berkualitas		Sumber Daya Manusia
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.798.459.325	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Inspektorat Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.832.565.000	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Opini BPK	Inspektorat Daerah
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	727.992.000	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Persentase terpenuhinya kebutuhan koordinasi antar kelompok masyarakat.	Inspektorat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	66.452.139.240	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	28 kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.771.457.000	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Persentase pelayanan publik	28 kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.259.841.120	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan	28 kecamatan



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.434.901.400	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	28 kecamatan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	422.633.900	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan desa	28 kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	200.000.000	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan	Kelurahan Rangkasbitung Barat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	200.000.000	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan	Kelurahan Muara Ciujung Barat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	200.000.000	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan	Kelurahan Muara Ciujung Timur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	200.000.000	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan	Kelurahan Cijoro Lebak
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	200.000.000	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan	Kelurahan Cijoro Pasir



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
		dan pemberantasan korupsi dan narkoba		Daerah yang berkualitas		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.193.885.070	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.702.704.000	PN 1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Persentase terpenuhinya kebutuhan koordinasi antar kelompok masyarakat.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.671.050.000	PN 1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	P. Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Persentase terpenuhinya kebutuhan koordinasi antar kelompok masyarakat.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	400.000.000	PN 1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	P.Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Persentase terpenuhinya kebutuhan koordinasi FKUB.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	400.000.000	PN 8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	P.Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Persentase terpenuhinya kebutuhan koordinasi antar kelompok masyarakat.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Program	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas			Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nasional	Provinsi	Daerah		
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	400.000.000	PN 1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	P.Prov 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	P. Kab 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas	Persentase terpenuhinya kebutuhan koordinasi antar kelompok masyarakat.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## BAB IV

### PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

#### 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Penyusunan Plafon Anggaran Sementara dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, dokumen PPAS hanya membahas pagu anggaran yang bersifat sementara, sedangkan alokasi definitifnya akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Adapun pagu anggaran berdasarkan urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Plafon Anggaran Belanja Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025**

Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran Sementara
<b>1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>1.248.584.345.501</b>
<b>1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>695.431.424.985</b>
1.01.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan	695.431.424.985
<b>1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>443.968.435.383</b>
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	205.295.304.389
1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Dr. ADJIDARMO	160.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Banjarsari	2.578.027.838
1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Baros	1.135.699.852
1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Bayah	2.392.657.000
1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Binuangeun	2.501.851.402
1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Bojongjuruh	1.202.929.000



Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran Sementara
1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bojongmanik	1.707.705.800
1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Cibadak	1.649.259.563
1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Cibeber	1.440.034.260
1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Cigemblong	1.935.105.453
1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Cihara	2.449.930.261
1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Cijaku	2.297.498.000
1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Cikulur	2.688.215.000
1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Cileles	1.637.160.894
1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Ciligrang	1.754.230.660
1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Cimarga	2.235.885.011
1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Cipanas	4.088.601.011
1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Cipendeuy	1.052.696.535
1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Cirinten	1.838.484.750
1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Cisimeut	1.294.576.247
1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Cisungsang	1.171.384.224
1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Citorek	1.291.222.700
1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Curugbitung	1.952.516.459
1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Gunungkencana	1.838.482.500
1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Kalanganyar	1.736.157.157
1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Kolelet	733.455.920
1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Lebakgedong	1.203.983.451
1.02.0.00.0.00.01.0028 Puskesmas Leuwidamar	1.489.767.810
1.02.0.00.0.00.01.0029 Puskesmas Maja	3.632.670.258
1.02.0.00.0.00.01.0030 Puskesmas Malingping	3.572.500.000
1.02.0.00.0.00.01.0031 Puskesmas Mandala	1.053.512.000
1.02.0.00.0.00.01.0032 Puskesmas Mekarsari	632.455.798
1.02.0.00.0.00.01.0033 Puskesmas Muncang	1.690.134.200
1.02.0.00.0.00.01.0034 Puskesmas Pajagan	1.210.165.000
1.02.0.00.0.00.01.0035 Puskesmas Pamandegan	1.481.199.037
1.02.0.00.0.00.01.0036 Puskesmas Panggarangan	2.458.131.512
1.02.0.00.0.00.01.0037 Puskesmas Parungsari	1.797.527.033
1.02.0.00.0.00.01.0038 Puskesmas Prabugantungan	1.653.325.174
1.02.0.00.0.00.01.0039 Puskesmas Rangkasbitung	3.035.899.422
1.02.0.00.0.00.01.0040 Puskesmas Sajira	1.765.563.635



Usuran Pemerintahan Daerah	Anggaran Sementara
1.02.0.00.0.00.01.0041 Puskesmas Sarageni	931.785.885
1.02.0.00.0.00.01.0042 Puskesmas Sobang	1.417.637.400
1.02.0.00.0.00.01.0043 Puskesmas Warunggunung	3.043.105.882
<b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>76.396.239.046</b>
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.358.150.111
1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD Alat berat dan Perbengkelan	669.794.935
1.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium	368.294.000
<b>1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>6.747.977.519</b>
1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	6.747.977.519
<b>1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>14.414.788.152</b>
1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.222.421.936
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.192.366.216
<b>1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>11.625.480.416</b>
1.06.0.00.0.00.04.0000 Dinas Sosial	11.625.480.416
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>147.210.534.270</b>
<b>2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>4.911.698.480</b>
2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja	4.348.614.880
2.07.0.00.0.00.01.0001 UPTD Latihan Kerja	563.083.600
<b>2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>524.000.000</b>
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	524.000.000
<b>2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>4.066.926.127</b>
2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan	4.066.926.127
<b>2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>199.999.800</b>
1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	199.999.800
<b>2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>58.830.403.064</b>
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	57.091.856.264
2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	1.082.490.400
2.11.0.00.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Lingkungan	656.056.400



Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran Sementara
<b>2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>8.200.686.907</b>
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.200.686.907
<b>2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>7.591.696.202</b>
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.591.696.202
<b>2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>6.183.123.294</b>
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	6.183.123.294
<b>2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>21.331.790.396</b>
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan	21.331.790.396
<b>2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>8.386.509.157</b>
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8.386.509.157
<b>2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>5.338.726.011</b>
2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.338.726.011
<b>2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>6.846.021.556</b>
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.846.021.556
<b>2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>8.933.187.040</b>
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan Olahraga	8.933.187.040
<b>2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>495.226.600</b>
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	495.226.600
<b>2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>59.840.100</b>
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	59.840.100
<b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>537.500.000</b>
2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	537.500.000
<b>2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>320.405.500</b>
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	320.405.500
<b>2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>4.452.794.036</b>
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.452.794.036



Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran Sementara
<b>3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>64.010.106.662</b>
<b>3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>5.700.966.185</b>
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan	5.700.966.185
<b>3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>18.216.740.200</b>
2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18.216.740.200
<b>3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>28.144.430.955</b>
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian	21.671.372.032
3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.473.058.923
<b>3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>11.704.423.122</b>
3.31.3.30.0.00.00.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.704.423.122
<b>3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>243.546.200</b>
3.31.3.30.0.00.00.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	243.546.200
<b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>111.049.898.461</b>
<b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>46.428.565.310</b>
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah	46.428.565.310
<b>4.02 SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>64.621.333.151</b>
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD	64.621.333.151
<b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>591.095.886.335</b>
<b>5.01 PERENCANAAN</b>	<b>10.299.819.363</b>
5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.299.819.363
<b>5.02 KEUANGAN</b>	<b>572.572.579.305</b>
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah	559.149.804.253
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah	13.422.775.052
<b>5.03 KEPEGAWAIAN</b>	<b>6.301.609.667</b>
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.301.609.667
<b>5.04 PENDIDIKAN dan PELATIHAN</b>	<b>1.021.878.100</b>
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.021.878.100
<b>5.05 PENELITIAN dan PENGEMBANGAN</b>	<b>899.999.900</b>
5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	899.999.900



Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran Sementara
<b>6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>14.359.016.325</b>
<b>6.01 INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>14.359.016.325</b>
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah	14.359.016.325
<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>72.340.972.660</b>
<b>7.01 KECAMATAN</b>	<b>72.340.972.660</b>
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Rangkasbitung	6.643.647.843
7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Rangkasbitung Barat	200.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Muara Ciujung Barat	200.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Muara Ciujung Timur	200.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Cijoro Lebak	200.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Cijoro Pasir	200.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kalanganyar	2.098.574.988
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Cibadak	2.580.700.529
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Warunggunung	2.224.982.137
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Cimarga	2.480.462.341
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Cikulur	2.782.001.670
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Leuwidamar	2.204.004.843
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sajira	2.673.000.445
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Maja	2.620.718.491
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Curugbitung	2.574.272.983
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Muncang	2.133.098.941
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Sobang	2.161.797.452
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Bojongmanik	2.454.835.010
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Cirinten	2.490.582.124
7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cipanas	2.260.721.068
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Lebakgedong	1.960.135.498
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Gunungkencana	2.424.292.517
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Cileles	2.786.186.897
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Banjarsari	2.701.324.689
7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Cijaku	2.402.093.137
7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Cigemblong	2.234.557.210
7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Malingping	2.358.191.801
7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Wanasalam	2.272.945.691



Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran Sementara
7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Panggarangan	2.113.100.361
7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Cihara	2.548.561.468
7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Bayah	2.500.428.352
7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Cibeber	2.653.793.739
7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Cilograng	2.001.960.435
<b>8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>8.767.639.070</b>
<b>8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>8.767.639.070</b>
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.767.639.070
<b>JUMLAH</b>	<b>2.257.418.399.284</b>

#### 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun 2025 memegang peran penting dalam pembangunan daerah karena beberapa faktor strategis. Pertama, tahun 2025 adalah awal dari periode kepemimpinan Kepala Daerah yang terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dan menjadi awal perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029. Kepala Daerah yang baru akan memiliki tanggung jawab penting dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan dalam periode jabatannya.

Plafon anggaran sementara untuk setiap Perangkat Daerah dikelompokkan berdasarkan urusan yang didalamnya memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2025. Satu program dimungkinkan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah secara terpadu dan berkesinambungan serta saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Program-program yang digunakan dalam penyusunan Plafon Anggaran Sementara adalah program-program yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029. Plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.2

**Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025**

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>695.431.424.985</b>
<b>1.01.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan</b>	<b>695.431.424.985</b>
<b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>644.548.097.973</b>
<b>1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>145.000.000</b>
1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000
1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000
1.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000
<b>1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>641.966.512.533</b>
1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	641.966.512.533
<b>1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30.000.000</b>
1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000
<b>1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>893.734.100</b>
1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.100
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.500.000
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.972.000
1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	161.264.000
1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	113.000.000
1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	154.000.000
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.000.000
<b>1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.206.258.002</b>
1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	376.000.000
1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	830.258.002
<b>1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>306.593.338</b>
1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.593.338
1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000
1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000
<b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>50.716.458.012</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>18.818.330.500</b>
1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	544.000.000
1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	2.635.000.000
1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.068.700.000
1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	350.000.000
1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	973.715.000
1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	255.000.000
1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000
1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	262.388.000
1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	525.600.000
1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	423.927.500
1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.480.000.000
1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.200.000.000
<b>1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>29.279.927.512</b>
1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	155.000.000
1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10.693.741.066
1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.200.000.000
1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.750.000.000
1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.271.258.296
1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	1.210.000.000
1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	795.864.900
1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	7.265.409.400
1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	205.000.000
1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.000.000
1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	213.108.600
1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.027.100.000
1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	983.445.250
1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.500.000.000
<b>1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>1.204.200.000</b>
1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	500.000.000
1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	150.000.000
1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	28.100.000
1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000
1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	13.000.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	413.100.000
<b>1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>1.414.000.000</b>
1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.274.000.000
1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.000.000
1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	38.925.000
1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	91.075.000
<b>1.01.04 PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>25.000.000</b>
<b>1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>25.000.000</b>
1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000
1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15.000.000
<b>1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA dan SASTRA</b>	<b>141.869.000</b>
<b>1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>141.869.000</b>
1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	141.869.000
<b>1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>443.968.435.383</b>
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan</b>	<b>205.295.304.389</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>152.689.822.265</b>
<b>1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>156.240.000</b>
1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000
1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	96.240.000
<b>1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>149.691.752.197</b>
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	149.691.752.197
<b>1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>578.487.931</b>
1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.387.578
1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.480.000
1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.568.300
1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000
1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	178.052.053



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.000.000
<b>1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.826.343.457</b>
1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	524.435.961
1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.251.907.496
<b>1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>436.998.680</b>
1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	343.748.680
1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.250.000
1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN dan UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>42.886.673.000</b>
<b>1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>42.816.673.000</b>
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	410.000.000
1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	30.000.000
1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.000.000
1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.000.000
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.000.000
1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	250.000.000
1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.000.000
1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	30.000.000
1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	30.000.000
1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	30.000.000
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.000.000
1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	200.000.000
1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	55.000.000
1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	20.000.000
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30.000.000
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	180.000.000
1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	30.000.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	85.000.000
1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.000.000
1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	30.000.000
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50.000.000
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40.621.673.000
1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	50.000.000
1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	20.000.000
1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	15.000.000
1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	250.000.000
1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	30.000.000
1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	30.000.000
1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	20.000.000
1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	20.000.000
1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	50.000.000
<b>1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>20.000.000</b>
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20.000.000
<b>1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>
1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	50.000.000
<b>1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>9.578.809.124</b>
<b>1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.428.809.124</b>
1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	9.378.809.124
1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50.000.000
<b>1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>
1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN dan MAKANAN MINUMAN</b>	<b>60.000.000</b>
<b>1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>20.000.000</b>
1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.000.000
<b>1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>20.000.000</b>
1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	20.000.000
<b>1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>20.000.000</b>
1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	20.000.000
<b>1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>80.000.000</b>
<b>1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.000.000</b>
1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	30.000.000
<b>1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>
1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	50.000.000
<b>1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Dr. ADJIDARMO</b>	<b>160.000.000.000</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>160.000.000.000</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>160.000.000.000</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	160.000.000.000
<b>1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Banjarsari</b>	<b>2.578.027.838</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.578.027.838</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.578.027.838</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.578.027.838
<b>1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Baros</b>	<b>1.135.699.852</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.135.699.852</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.135.699.852</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.135.699.852
<b>1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Bayah</b>	<b>2.392.657.000</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.392.657.000</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.392.657.000</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.392.657.000
<b>1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Binuangeun</b>	<b>2.501.851.402</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.501.851.402</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.501.851.402</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.501.851.402
<b>1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Bojongjuruh</b>	<b>1.202.929.000</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.202.929.000</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.202.929.000</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.202.929.000
<b>1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bojongmanik</b>	<b>1.707.705.800</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.707.705.800</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.707.705.800</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.707.705.800
<b>1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Cibadak</b>	<b>1.649.259.563</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.649.259.563</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.649.259.563</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.649.259.563
<b>1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Cibeber</b>	<b>1.440.034.260</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.440.034.260</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.440.034.260</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.440.034.260
<b>1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Cigemblong</b>	<b>1.935.105.453</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.935.105.453</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.935.105.453</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.935.105.453
<b>1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Cihara</b>	<b>2.449.930.261</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.449.930.261</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.449.930.261</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.449.930.261
<b>1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Cijaku</b>	<b>2.297.498.000</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.297.498.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.297.498.000</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.297.498.000
<b>1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Cikulur</b>	<b>2.688.215.000</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.688.215.000</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.688.215.000</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.688.215.000
<b>1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Cileles</b>	<b>1.637.160.894</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.637.160.894</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.637.160.894</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.637.160.894
<b>1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Cilograng</b>	<b>1.754.230.660</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.754.230.660</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.754.230.660</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.754.230.660
<b>1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Cimarga</b>	<b>2.235.885.011</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.235.885.011</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.235.885.011</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.235.885.011
<b>1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Cipanas</b>	<b>4.088.601.011</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.088.601.011</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>4.088.601.011</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.088.601.011
<b>1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Cipendey</b>	<b>1.052.696.535</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.052.696.535</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.052.696.535</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.052.696.535
<b>1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Cirinten</b>	<b>1.838.484.750</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.838.484.750</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.838.484.750</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.838.484.750
<b>1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Cisimeut</b>	<b>1.294.576.247</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.294.576.247</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.294.576.247</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.294.576.247
<b>1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Cisungsang</b>	<b>1.171.384.224</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.171.384.224</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.171.384.224</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.171.384.224
<b>1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Citorek</b>	<b>1.291.222.700</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.291.222.700</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.291.222.700</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.291.222.700
<b>1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Curugbitung</b>	<b>1.952.516.459</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.952.516.459</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.952.516.459</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.952.516.459
<b>1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Gunungkencana</b>	<b>1.838.482.500</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.838.482.500</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.838.482.500</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.838.482.500
<b>1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Kalanganyar</b>	<b>1.736.157.157</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.736.157.157</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.736.157.157</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.736.157.157
<b>1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Kolelet</b>	<b>733.455.920</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>733.455.920</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>733.455.920</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	733.455.920
<b>1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Lebakgedong</b>	<b>1.203.983.451</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.203.983.451</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.203.983.451</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.203.983.451
<b>1.02.0.00.0.00.01.0028 Puskesmas Leuwidamar</b>	<b>1.489.767.810</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.489.767.810</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.489.767.810</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.489.767.810
<b>1.02.0.00.0.00.01.0029 Puskesmas Maja</b>	<b>3.632.670.258</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.632.670.258</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>3.632.670.258</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.632.670.258



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0030 Puskesmas Malingping	3.572.500.000
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.572.500.000</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>3.572.500.000</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.572.500.000
1.02.0.00.0.00.01.0031 Puskesmas Mandala	1.053.512.000
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.053.512.000</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.053.512.000</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.053.512.000
1.02.0.00.0.00.01.0032 Puskesmas Mekarsari	632.455.798
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>632.455.798</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>632.455.798</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	632.455.798
1.02.0.00.0.00.01.0033 Puskesmas Muncang	1.690.134.200
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.690.134.200</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.690.134.200</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.690.134.200
1.02.0.00.0.00.01.0034 Puskesmas Pajagan	1.210.165.000
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.210.165.000</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.210.165.000</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.210.165.000
1.02.0.00.0.00.01.0035 Puskesmas Pamandegan	1.481.199.037
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.481.199.037</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.481.199.037</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.481.199.037
1.02.0.00.0.00.01.0036 Puskesmas Panggarangan	2.458.131.512
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.458.131.512</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.458.131.512</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.458.131.512
1.02.0.00.0.00.01.0037 Puskesmas Parungsari	1.797.527.033
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.797.527.033</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.797.527.033</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.797.527.033
1.02.0.00.0.00.01.0038 Puskesmas Prabugantungan	1.653.325.174
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.653.325.174</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.653.325.174</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.653.325.174
<b>1.02.0.00.0.00.01.0039 Puskesmas Rangkasbitung</b>	<b>3.035.899.422</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.035.899.422</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>3.035.899.422</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.035.899.422
<b>1.02.0.00.0.00.01.0040 Puskesmas Sajira</b>	<b>1.765.563.635</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.765.563.635</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.765.563.635</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.765.563.635
<b>1.02.0.00.0.00.01.0041 Puskesmas Sarageni</b>	<b>931.785.885</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>931.785.885</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>931.785.885</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	931.785.885
<b>1.02.0.00.0.00.01.0042 Puskesmas Sobang</b>	<b>1.417.637.400</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.417.637.400</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.417.637.400</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.417.637.400
<b>1.02.0.00.0.00.01.0043 Puskesmas Warunggunung</b>	<b>3.043.105.882</b>
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.043.105.882</b>
<b>1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>3.043.105.882</b>
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.043.105.882
<b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG</b>	<b>76.396.239.046</b>
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>75.358.150.111</b>
<b>1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>20.284.957.511</b>
<b>1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>147.010.400</b>
1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.604.400
1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.406.000
<b>1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.637.395.874</b>
1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.637.395.874
<b>1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>625.956.100</b>
1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.964.300
1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.250.000
1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000
1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.134.300



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	243.710.000
1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	88.437.600
1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.459.900
<b>1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.391.411.262</b>
1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.839.360
1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.018.571.902
<b>1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>483.183.875</b>
1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	410.419.000
1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.550.000
1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.214.875
<b>1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>5.628.820.350</b>
<b>1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.923.201.350</b>
1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.663.621.350
1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	259.580.000
<b>1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.705.619.000</b>
1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.141.520.000
1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000.000
1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	564.099.000
<b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>2.450.680.750</b>
<b>1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.450.680.750</b>
1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50.000.000
1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	420.936.000
1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.979.744.750
<b>1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM dan PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>15.000.000.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15.000.000.000</b>
1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	14.500.000.000
1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	500.000.000
<b>1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>1.181.191.000</b>
<b>1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.181.191.000</b>
1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	50.000.000
1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	75.000.000
1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	923.832.750
1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	132.358.250
<b>1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN dan PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>400.000.000</b>
<b>1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>400.000.000</b>
1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	150.598.000
1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	249.402.000
<b>1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>375.000.000</b>
<b>1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>375.000.000</b>
1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	375.000.000
<b>1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>29.616.104.500</b>
<b>1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>29.616.104.500</b>
1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.500.000.000
1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.009.782.000
1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	19.091.528.000
1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.350.000.000
1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	1.148.690.000
1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	464.620.000
1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	5.051.484.500
<b>1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>206.136.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>150.000.000</b>
1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	150.000.000
<b>1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>56.136.000</b>
1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	56.136.000
<b>1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>215.260.000</b>
<b>1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>
1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	25.000.000
<b>1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>
1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	100.000.000
<b>1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.260.000</b>
1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	90.260.000
<b>1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD Alat berat dan Perbengkelan</b>	<b>669.794.935</b>
<b>1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>669.794.935</b>
<b>1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>669.794.935</b>
1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	669.794.935
<b>1.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium</b>	<b>368.294.000</b>
<b>1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>368.294.000</b>
<b>1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>368.294.000</b>
1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	368.294.000
<b>1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN dan KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>6.747.977.519</b>
<b>1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan</b>	<b>6.747.977.519</b>
<b>1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.764.587.719</b>
<b>1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>86.368.000</b>
1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.963.000
1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.405.000
<b>1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.327.451.306</b>
1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.327.451.306



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>340.488.150</b>
1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.684.000
1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.824.000
1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.894.000
1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.020.000
1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	94.096.150
1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.970.000
<b>1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>785.060.263</b>
1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.479.223
1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.460.000
1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	637.121.040
<b>1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>225.220.000</b>
1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.220.000
1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
<b>1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>219.309.900</b>
<b>1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>74.999.900</b>
1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	74.999.900
<b>1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>94.310.000</b>
1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	94.310.000
<b>1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>50.000.000</b>
1.04.02.2.06.0006 Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	50.000.000
<b>1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>1.714.079.900</b>
<b>1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>399.080.000</b>
1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	399.080.000
<b>1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>1.314.999.900</b>
1.04.03.2.03.0002 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	1.314.999.900
<b>1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA dan UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>50.000.000</b>
<b>1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>50.000.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	50.000.000
<b>1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>14.414.788.152</b>
<b>1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</b>	<b>9.222.421.936</b>
<b>1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.702.703.436</b>
<b>1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.643.500</b>
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.926.000
1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000
1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000
1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000
1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.717.500
<b>1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.579.117.986</b>
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.579.117.986
<b>1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>80.476.100</b>
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.138.000
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.350.000
1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	19.768.200
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.470.000
1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.749.900
<b>1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.586.682.100</b>
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.614.700
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.481.067.400
<b>1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>432.783.750</b>
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201.320.000
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.521.750
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.630.000
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.312.000
<b>1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM</b>	<b>404.116.600</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>255.159.400</b>
1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.200.800
1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	186.837.600
1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.121.000
1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000
<b>1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>148.957.200</b>
1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.100
1.05.02.2.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	69.956.200
1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	15.900.000
1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	58.100.900
<b>1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN dan PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>115.601.900</b>
<b>1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>115.601.900</b>
1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.600.000
1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.001.900
<b>1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>5.192.366.216</b>
<b>1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.486.576.776</b>
<b>1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>56.999.000</b>
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.999.000
<b>1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.499.614.555</b>
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.499.614.555
<b>1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>106.545.000</b>
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	106.545.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>383.198.733</b>
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.511.400
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.940.000
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.036.000
1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.660.000
1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	24.001.333
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.050.000
<b>1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>996.032.488</b>
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.005.840
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	906.026.648
<b>1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>444.187.000</b>
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.402.500
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.151.500
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.633.000
<b>1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1.705.789.440</b>
<b>1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>197.900.000</b>
1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	197.900.000
<b>1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>325.392.440</b>
1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	32.267.700
1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	75.093.000
1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	78.245.000
1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	139.786.740
<b>1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>1.086.200.000</b>
1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	478.550.000
1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	44.580.000
1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	563.070.000
<b>1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>96.297.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	96.297.000
<b>1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>11.625.480.416</b>
<b>1.06.0.00.0.00.04.0000 Dinas Sosial</b>	<b>11.625.480.416</b>
<b>1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.912.354.716</b>
<b>1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>29.674.000</b>
1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.002.000
1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.672.000
<b>1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.906.191.728</b>
1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.906.191.728
<b>1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>218.341.700</b>
1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.455.100
1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.780.000
1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.026.700
1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000
1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	45.069.900
1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.030.000
<b>1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>595.628.638</b>
1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.479.160
1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	480.149.478
<b>1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>162.518.650</b>
1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.766.650
1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.150.000
1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.602.000
<b>1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>440.660.000</b>
<b>1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>440.660.000</b>
1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	266.750.000
1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16.100.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	157.810.000
<b>1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>9.000.000</b>
<b>1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>9.000.000</b>
1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	9.000.000
<b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>452.690.000</b>
<b>1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>142.530.000</b>
1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	69.400.000
1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	22.000.000
1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	8.900.000
1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.000.000
1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	22.230.000
1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000
<b>1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>310.160.000</b>
1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.000.000
1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	110.160.000
1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang	22.000.000
1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.000.000
1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	9.000.000
1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan	150.000.000
<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN dan JAMINAN SOSIAL</b>	<b>5.631.933.700</b>
<b>1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.631.933.700</b>
1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000
1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.180.700
1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.563.753.000
<b>1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>170.130.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>170.130.000</b>
1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	146.250.000
1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	23.880.000
<b>1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>8.712.000</b>
<b>1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>8.712.000</b>
1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8.712.000
<b>2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>4.911.698.480</b>
<b>2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>4.348.614.880</b>
<b>2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.631.604.880</b>
<b>2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>58.184.000</b>
2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.464.000
2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.720.000
<b>2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.444.633.926</b>
2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.444.633.926
<b>2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>263.642.200</b>
2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000
2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.640.000
2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.300.000
2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.864.000
2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	53.868.200
2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.970.000
<b>2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>562.678.336</b>
2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.342.400
2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.335.936
<b>2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>302.466.418</b>
2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	181.551.250
2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.430.000
2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.485.168
<b>2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA dan PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>43.000.000</b>
<b>2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>43.000.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	43.000.000
<b>2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>457.000.000</b>
<b>2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>201.000.000</b>
2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	201.000.000
<b>2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>156.000.000</b>
2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	51.000.000
2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	105.000.000
<b>2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>
2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100.000.000
<b>2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>217.010.000</b>
<b>2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>99.000.000</b>
2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	99.000.000
<b>2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>118.010.000</b>
2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.000.000
2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000
2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	50.010.000
<b>2.07.0.00.0.00.01.0001 UPTD Latihan Kerja</b>	<b>563.083.600</b>
<b>2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA dan PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>563.083.600</b>
<b>2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>563.083.600</b>
2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	480.083.600
2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	83.000.000
<b>2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>524.000.000</b>
<b>2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana</b>	<b>524.000.000</b>
<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>180.000.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>40.000.000</b>
2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	40.000.000
<b>2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>90.000.000</b>
2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	40.000.000
2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50.000.000
<b>2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>
2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>80.000.000</b>
<b>2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>80.000.000</b>
2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000
<b>2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>114.000.000</b>
<b>2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>54.000.000</b>
2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	24.000.000
2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000
<b>2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>60.000.000</b>
2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000
<b>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>150.000.000</b>
<b>2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>
2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	50.000.000
<b>2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	100.000.000
<b>2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>4.066.926.127</b>
<b>2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>4.066.926.127</b>
<b>2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.286.938.727</b>
<b>2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>30.510.000</b>
2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.530.000
2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.980.000
<b>2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.447.941.653</b>
2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.447.941.653
<b>2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>81.484.500</b>
2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.610.000
2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.400.000
2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000
2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.704.500
2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	17.890.000
2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.880.000
<b>2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>527.787.910</b>
2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.505.810
2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	413.282.100
<b>2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>199.214.664</b>
2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.965.350
2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.800.000
2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.449.314
<b>2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>100.000.000</b>
<b>2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>
2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	100.000.000
<b>2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI dan KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>529.999.900</b>
<b>2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>65.000.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	50.000.000
2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	15.000.000
<b>2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>300.000.000</b>
2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300.000.000
<b>2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>164.999.900</b>
2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	164.999.900
<b>2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>75.000.000</b>
<b>2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>20.000.000</b>
2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	20.000.000
<b>2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>55.000.000</b>
2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	15.000.000
2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	20.000.000
<b>2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>74.987.500</b>
<b>2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>74.987.500</b>
2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000
2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	19.987.500
2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	40.000.000
<b>2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>199.999.800</b>
<b>1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan</b>	<b>199.999.800</b>
<b>2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>49.999.900</b>
<b>2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.999.900</b>
2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.999.900
<b>2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, dan GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM dan TANAH ABSENTEE</b>	<b>149.999.900</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>149.999.900</b>
2.10.06.2.01.0002 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	149.999.900
<b>2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>58.830.403.064</b>
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>57.091.856.264</b>
<b>2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.230.353.464</b>
<b>2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>105.056.000</b>
2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.759.000
2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.297.000
<b>2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.942.080.820</b>
2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.923.975.820
2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.105.000
<b>2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>353.496.100</b>
2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.613.400
2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000
2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.384.000
2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.455.800
2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.569.500
2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	126.777.400
2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.396.000
2.11.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	55.300.000
<b>2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.375.816.544</b>
2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.542.600
2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.650.000
2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.049.623.944
<b>2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>453.904.000</b>
2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	229.124.000
2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.550.000
2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.230.000
<b>2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>20.000.000</b>
<b>2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>20.000.000</b>
2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	20.000.000
<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>792.836.000</b>
<b>2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>739.436.000</b>
2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	34.580.000
2.11.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	56.112.000
2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	169.900.000
2.11.03.2.01.0008 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	42.320.000
2.11.03.2.01.0009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	170.310.000
2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	34.614.000
2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	184.500.000
2.11.03.2.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	47.100.000
<b>2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>16.280.000</b>
2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	16.280.000
<b>2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>37.120.000</b>
2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	37.120.000
<b>2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>150.000.000</b>
<b>2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>
2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	150.000.000
<b>2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>30.599.800</b>
<b>2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>30.599.800</b>
2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	30.599.800



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>84.850.000</b>
<b>2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>84.850.000</b>
2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	84.850.000
<b>2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL dan HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>25.000.000</b>
<b>2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>25.000.000</b>
2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	25.000.000
<b>2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN dan PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>50.000.000</b>
<b>2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>
2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	50.000.000
<b>2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>54.914.000</b>
<b>2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>54.914.000</b>
2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	54.914.000
<b>2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>47.300.000</b>
<b>2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>47.300.000</b>
2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	47.300.000
<b>2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>42.606.003.000</b>
<b>2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah</b>	<b>42.606.003.000</b>
2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	285.132.000
2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	41.570.871.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	750.000.000
<b>2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah</b>	<b>1.082.490.400</b>
<b>2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>1.082.490.400</b>
<b>2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah</b>	<b>1.082.490.400</b>
2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1.082.490.400
<b>2.11.0.00.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Lingkungan</b>	<b>656.056.400</b>
<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>656.056.400</b>
<b>2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>656.056.400</b>
2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	656.056.400
<b>2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL</b>	<b>8.200.686.907</b>
<b>2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>8.200.686.907</b>
<b>2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.940.686.907</b>
<b>2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>40.000.000</b>
2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000
2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000
<b>2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.625.493.975</b>
2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.625.493.975
<b>2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.272.060.000</b>
2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.600.000
2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000
2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000
2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.860.000
2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	1.044.600.000
2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000
<b>2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.760.698.132</b>
2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229.668.600
2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.531.029.532
<b>2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>242.434.800</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.434.800
2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000
2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
<b>2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>85.000.000</b>
<b>2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>85.000.000</b>
2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	10.000.000
2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	50.000.000
2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	25.000.000
<b>2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>85.000.000</b>
<b>2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>85.000.000</b>
2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	50.000.000
2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	35.000.000
<b>2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>90.000.000</b>
<b>2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>40.000.000</b>
2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20.000.000
2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	20.000.000
<b>2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>50.000.000</b>
2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.000.000
2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.000.000
2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	5.000.000
<b>2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA</b>	<b>7.591.696.202</b>
<b>2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>7.591.696.202</b>
<b>2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.388.620.602</b>
<b>2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>92.223.600</b>
2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.339.800
2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.883.800
<b>2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.184.437.402</b>
2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.184.437.402



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>172.708.500</b>
2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.911.000
2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.810.000
2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.649.000
2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.654.500
2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.090.000
2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	20.594.000
2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000
<b>2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>10.000.000</b>
2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	10.000.000
<b>2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>829.015.800</b>
2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.036.800
2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	478.979.000
<b>2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.235.300</b>
2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.855.300
2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.220.000
2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.160.000
<b>2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>71.002.400</b>
<b>2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>71.002.400</b>
2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	20.714.900
2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	50.287.500
<b>2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>24.790.200</b>
<b>2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>24.790.200</b>
2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	24.790.200
<b>2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.524.983.500</b>
<b>2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>1.524.983.500</b>
2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	150.000.000
2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	385.999.900
2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	899.999.900
2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	88.983.700
<b>2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT dan MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>582.299.500</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>2.13.05.2.01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>582.299.500</b>
2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	26.767.600
2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	334.879.400
2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	210.652.700
2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	9.999.800
<b>2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK dan KELUARGA BERENCANA</b>	<b>6.183.123.294</b>
<b>2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana</b>	<b>6.183.123.294</b>
<b>2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.032.123.294</b>
<b>2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>150.000.000</b>
2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000
2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000
<b>2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.639.582.466</b>
2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.639.582.466
<b>2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>307.684.000</b>
2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.000.000
2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000
2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.684.000
2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	30.000.000
2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000
<b>2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.549.856.828</b>
2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.000.000
2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.393.856.828
<b>2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>385.000.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.000.000
2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000
2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000
<b>2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>20.000.000</b>
<b>2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.000.000</b>
2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	20.000.000
<b>2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>81.000.000</b>
<b>2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>16.000.000</b>
2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	16.000.000
<b>2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>65.000.000</b>
2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	15.000.000
2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	50.000.000
<b>2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN dan PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>50.000.000</b>
<b>2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>50.000.000</b>
2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	50.000.000
<b>2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>21.331.790.396</b>
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan</b>	<b>21.331.790.396</b>
<b>2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>17.625.219.846</b>
<b>2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>91.490.700</b>
2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.210.800
2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.719.900
2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.560.000
<b>2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.232.512.085</b>
2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.232.512.085
<b>2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>250.000.000</b>
2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	250.000.000
<b>2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>317.942.590</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.012.300
2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.850.000
2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.735.790
2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.648.000
2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	72.146.500
2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.550.000
<b>2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.448.744.471</b>
2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.003.690.607
2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.445.053.864
<b>2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>284.530.000</b>
2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.000.000
2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.530.000
2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000
<b>2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS dan ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>3.706.570.550</b>
<b>2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>2.593.022.550</b>
2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.516.961.200
2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.076.061.350
<b>2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>43.620.000</b>
2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	43.620.000
<b>2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>91.050.000</b>
2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000
2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	41.050.000
<b>2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>352.320.000</b>
2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	102.320.000
2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	250.000.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>626.558.000</b>
2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	425.000.000
2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	201.558.000
<b>2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI dan INFORMATIKA</b>	<b>8.386.509.157</b>
<b>2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</b>	<b>8.386.509.157</b>
<b>2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.773.828.057</b>
<b>2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>128.552.900</b>
2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.159.500
2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.393.400
<b>2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.416.640.407</b>
2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.416.640.407
<b>2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>290.931.600</b>
2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.739.400
2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.000.000
2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.030.000
2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.926.400
2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.808.000
2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	25.867.800
2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.560.000
<b>2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>675.786.750</b>
2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.496.600
2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	427.290.150
<b>2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.220.846.600</b>
2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.100.600
2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.730.000
2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.163.016.000
<b>2.16.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>41.069.800</b>
2.16.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	41.069.800
<b>2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI dan KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>718.474.600</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>718.474.600</b>
2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	41.588.800
2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	27.377.600
2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi	77.190.300
2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	522.318.000
2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten	49.999.900
<b>2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>894.206.500</b>
<b>2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>894.206.500</b>
2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	702.175.500
2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	59.680.000
2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	21.791.200
2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	110.559.800
<b>2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, dan MENENGAH</b>	<b>5.338.726.011</b>
<b>2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>5.338.726.011</b>
<b>2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.748.726.011</b>
<b>2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>45.078.900</b>
2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.378.900
2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.700.000
<b>2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.839.738.961</b>
2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.839.738.961
<b>2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>193.322.510</b>
2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.000.010
2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.020.000
2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.960.500
2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	28.702.000
2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.640.000
<b>2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>614.572.240</b>
2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.424.000
2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	464.148.240
<b>2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56.013.400</b>
2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.253.400



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000
2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.080.000
<b>2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN dan PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>50.000.000</b>
<b>2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>50.000.000</b>
2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
<b>2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN dan LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>50.000.000</b>
<b>2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>
2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.000.000
<b>2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN dan PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>40.000.000</b>
<b>2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.000.000</b>
2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000
<b>2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, dan USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>200.000.000</b>
<b>2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>200.000.000</b>
2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100.000.000
2.17.07.2.01.0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	50.000.000
2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	50.000.000
<b>2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>250.000.000</b>
<b>2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>250.000.000</b>
2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	250.000.000
<b>2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>6.846.021.556</b>
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>6.846.021.556</b>
<b>2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.649.101.756</b>
<b>2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.426.500</b>
2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.762.600
2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.663.900
<b>2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.089.096.497</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.089.096.497
<b>2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>173.885.427</b>
2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.570.600
2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.240.000
2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.273.000
2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.536.227
2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000
2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	56.095.600
2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.490.000
<b>2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.284.903.532</b>
2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	434.643.520
2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	850.260.012
<b>2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.789.800</b>
2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.109.800
2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.480.000
2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.200.000
<b>2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>9.999.800</b>
<b>2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>9.999.800</b>
2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	9.999.800
<b>2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>41.120.000</b>
<b>2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>41.120.000</b>
2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	41.120.000
<b>2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>38.380.000</b>
<b>2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>38.380.000</b>
2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	38.380.000
<b>2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>101.700.000</b>
<b>2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>101.700.000</b>
2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	56.700.000
2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	45.000.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA dan SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>5.720.000</b>
<b>2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.720.000</b>
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	5.720.000
<b>2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN dan OLAHRAGA</b>	<b>8.933.187.040</b>
<b>2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan Olahraga</b>	<b>8.933.187.040</b>
<b>2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.584.210.090</b>
<b>2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.049.900</b>
2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.699.900
2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.350.000
<b>2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.389.600.906</b>
2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.389.600.906
<b>2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>195.337.500</b>
2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.500.000
2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.640.000
2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.083.800
2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.984.000
2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	21.499.700
2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.630.000
<b>2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>803.271.434</b>
2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000
2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.431.520
2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.839.914
<b>2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>172.950.350</b>
2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.670.350
2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.280.000
2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000
<b>2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>819.389.000</b>
<b>2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>744.389.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	341.185.000
2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	403.204.000
<b>2.19.02.2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>75.000.000</b>
2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	75.000.000
<b>2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>4.454.587.950</b>
<b>2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>182.501.550</b>
2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	182.501.550
<b>2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.187.828.400</b>
2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.187.828.400
<b>2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>2.079.272.000</b>
2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	301.222.000
2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	1.778.050.000
<b>2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>850.000.000</b>
2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	750.000.000
2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	100.000.000
<b>2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>154.986.000</b>
2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	79.986.000
2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	75.000.000
<b>2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>75.000.000</b>
<b>2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>75.000.000</b>
2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	75.000.000
<b>2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>495.226.600</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</b>	<b>495.226.600</b>
<b>2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>495.226.600</b>
<b>2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>495.226.600</b>
2.20.02.2.01.0007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	85.977.500
2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	83.206.600
2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	135.149.900
2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	113.136.500
2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	77.756.100
<b>2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>59.840.100</b>
<b>2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</b>	<b>59.840.100</b>
<b>2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>59.840.100</b>
<b>2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>59.840.100</b>
2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	59.840.100
<b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>537.500.000</b>
<b>2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<b>537.500.000</b>
<b>2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>75.000.000</b>
<b>2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>75.000.000</b>
2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	75.000.000
<b>2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>112.500.000</b>
<b>2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>112.500.000</b>
2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	112.500.000
<b>2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN dan PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>250.000.000</b>
<b>2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>
2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	100.000.000
<b>2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>
2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	150.000.000
<b>2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>100.000.000</b>
<b>2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>
2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	100.000.000
<b>2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>320.405.500</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>320.405.500</b>
<b>2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>320.405.500</b>
<b>2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>320.405.500</b>
2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	90.406.200
2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.999.600
2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	29.999.700
<b>2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>4.452.794.036</b>
<b>2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>4.452.794.036</b>
<b>2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.328.795.536</b>
<b>2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>58.613.700</b>
2.24.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.303.700
2.24.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.310.000
<b>2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.029.608.226</b>
2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.029.608.226
<b>2.24.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>24.355.000</b>
2.24.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.355.000
<b>2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>140.058.700</b>
2.24.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.433.900
2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.988.000
2.24.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.252.000
2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.435.400
2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.120.000
2.24.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	29.829.400
2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.000.000
<b>2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>889.191.960</b>
2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	227.340.000
2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	661.851.960
<b>2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>186.967.950</b>
2.24.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.158.950



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.24.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.761.000
2.24.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.048.000
<b>2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>123.998.500</b>
<b>2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>123.998.500</b>
2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	123.998.500
<b>3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN dan PERIKANAN</b>	<b>5.700.966.185</b>
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan</b>	<b>5.700.966.185</b>
<b>3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.993.533.185</b>
<b>3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>64.024.800</b>
3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.194.800
3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.830.000
<b>3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.060.307.175</b>
3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.060.307.175
<b>3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>202.745.900</b>
3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.207.000
3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.500.000
3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.204.000
3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.765.700
3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.420.000
3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	31.269.200
3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.380.000
<b>3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>540.452.260</b>
3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	480.000
3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.098.400
3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	440.873.860
<b>3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>126.003.050</b>
3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.063.050
3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.940.000
<b>3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>190.186.800</b>
<b>3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>129.495.600</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	14.522.000
3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	114.973.600
<b>3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>39.386.200</b>
3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	24.180.300
3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	15.205.900
<b>3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>21.305.000</b>
3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	21.305.000
<b>3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>491.408.900</b>
<b>3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>89.748.900</b>
3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	29.790.000
3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	19.999.900
3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	19.960.000
3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	19.999.000
<b>3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>401.660.000</b>
3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.900.000
3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	386.760.000
<b>3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN dan PERIKANAN</b>	<b>5.837.300</b>
<b>3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>5.837.300</b>
3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5.837.300
<b>3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN dan PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>20.000.000</b>
<b>3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>20.000.000</b>
3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
<b>3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>18.216.740.200</b>
<b>2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<b>18.216.740.200</b>
<b>3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.851.639.200</b>
<b>3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>95.000.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000
3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000
<b>3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.013.149.764</b>
3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.013.149.764
<b>3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>391.038.300</b>
3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.756.500
3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000
3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.640.000
3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.069.300
3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	95.860.000
3.26.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	40.712.500
3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000
<b>3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.030.019.136</b>
3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.794.640
3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	786.224.496
<b>3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>322.432.000</b>
3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.612.000
3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.820.000
3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
<b>3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>10.800.000.000</b>
<b>3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>10.800.000.000</b>
3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10.500.000.000
3.26.02.2.03.0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000
<b>3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>1.255.101.000</b>
<b>3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>1.255.101.000</b>
3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.105.101.000
3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	150.000.000
<b>3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA dan EKONOMI KREATIF</b>	<b>310.000.000</b>
<b>3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>310.000.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
3.26.05.2.01.0005 Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	160.000.000
3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	150.000.000
<b>3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>28.144.430.955</b>
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian</b>	<b>21.671.372.032</b>
<b>3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>19.740.372.232</b>
<b>3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>78.514.000</b>
3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.514.000
3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000
<b>3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>17.463.828.685</b>
3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.463.828.685
<b>3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>269.544.100</b>
3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.991.600
3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.000.000
3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.350.000
3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.210.700
3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.996.000
3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	39.995.800
3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000
<b>3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>425.000.000</b>
3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	425.000.000
<b>3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.264.074.767</b>
3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.522.600
3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.078.552.167
<b>3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>239.410.680</b>
3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.998.400
3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.436.800
3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.975.480
<b>3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN dan PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>1.257.000.000</b>
<b>3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>57.000.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	30.000.000
3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	27.000.000
<b>3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.200.000.000</b>
3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	300.000.000
3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	900.000.000
<b>3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN dan PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>30.000.000</b>
<b>3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>30.000.000</b>
3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	30.000.000
<b>3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN dan PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>70.000.000</b>
<b>3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>70.000.000</b>
3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.000.000
3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	20.000.000
<b>3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>74.999.800</b>
<b>3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>74.999.800</b>
3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	24.999.900
3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	24.999.900
3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	25.000.000
<b>3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>499.000.000</b>
<b>3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>499.000.000</b>
3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	300.000.000
3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100.000.000
3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	74.000.000
3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	25.000.000
<b>3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>	<b>6.473.058.923</b>
<b>3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.764.194.777</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>24.400.000</b>
3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.500.000
3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.900.000
<b>3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.834.590.585</b>
3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.834.590.585
<b>3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>129.823.950</b>
3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.973.100
3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.311.000
3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.419.800
3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.320.000
3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	17.575.050
3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.225.000
<b>3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>522.382.442</b>
3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.826.200
3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.556.242
<b>3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>252.997.800</b>
3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.055.800
3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.950.000
3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.992.000
<b>3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN dan PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>549.883.030</b>
<b>3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>315.516.130</b>
3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	315.516.130
<b>3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>234.366.900</b>
3.27.02.2.05.0007 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	234.366.900
<b>3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN dan KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>70.000.000</b>
<b>3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
<b>3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.000.000</b>
3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	20.000.000
<b>3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>88.981.116</b>
<b>3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>88.981.116</b>
3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	88.981.116
<b>3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>11.704.423.122</b>
<b>3.31.3.30.0.00.00.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>11.704.423.122</b>
<b>3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.108.588.122</b>
<b>3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>213.243.600</b>
3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.205.000
3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.038.600
<b>3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.524.000.286</b>
3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.524.000.286
<b>3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>154.197.600</b>
3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000
3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.200.000
3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.417.600
3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.140.000
3.30.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	17.290.000
3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.150.000
<b>3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.850.480.636</b>
3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238.239.600
3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.612.241.036
<b>3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>366.666.000</b>
3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.280.000
3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.410.000
3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	104.976.000
<b>3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>2.180.456.900</b>
<b>3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>2.180.456.900</b>
3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.180.456.900



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK dan BARANG PENTING</b>	<b>1.168.378.400</b>
<b>3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.090.378.400</b>
3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.090.378.400
<b>3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>78.000.000</b>
3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	78.000.000
<b>3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI dan PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>217.609.900</b>
<b>3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>217.609.900</b>
3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	155.630.900
3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	61.979.000
<b>3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN dan PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>29.389.800</b>
<b>3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>29.389.800</b>
3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	29.389.800
<b>3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>243.546.200</b>
<b>3.31.3.30.0.00.00.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>243.546.200</b>
<b>3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN dan PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>165.684.900</b>
<b>3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>165.684.900</b>
3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	165.684.900
<b>3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>77.861.300</b>
<b>3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>77.861.300</b>
3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	77.861.300
<b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>46.428.565.310</b>
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah</b>	<b>46.428.565.310</b>
<b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>33.178.566.110</b>
<b>4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>70.015.800</b>
4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.883.100



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.132.700
<b>4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>17.609.057.378</b>
4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.609.057.378
<b>4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000</b>
4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000
<b>4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.711.246.000</b>
4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	411.270.000
4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000.000
4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.977.000
4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	150.000.000
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.999.000
<b>4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.000.000.000</b>
4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.000.000.000
<b>4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.489.089.800</b>
4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.499.970.000
4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.932.000
4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.889.187.800
<b>4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.214.629.000</b>
4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	670.150.000
4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.016.276.000
4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	307.924.500
4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	220.278.500
<b>4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>2.534.528.132</b>
4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.504.528.132
4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30.000.000
<b>4.01.01.2.13 Penataan Organisasi</b>	<b>300.000.000</b>
4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	150.000.000
4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	50.000.000
4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100.000.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>1.150.000.000</b>
4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan	150.000.000
4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1.000.000.000
<b>4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN dan KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>11.899.999.200</b>
<b>4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>249.999.800</b>
4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	249.999.800
<b>4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>11.000.000.000</b>
4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11.000.000.000
<b>4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum</b>	<b>549.999.500</b>
4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	199.999.800
4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	149.999.900
4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	199.999.800
<b>4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah</b>	<b>99.999.900</b>
4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	99.999.900
<b>4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN dan PEMBANGUNAN</b>	<b>1.350.000.000</b>
<b>4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>250.000.000</b>
4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	150.000.000
4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100.000.000
<b>4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>350.000.000</b>
4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	150.000.000
4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	200.000.000
<b>4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>750.000.000</b>
4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	350.000.000
4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	250.000.000
4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150.000.000
<b>4.02 SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>64.621.333.151</b>
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD</b>	<b>64.621.333.151</b>
<b>4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>40.153.821.931</b>
<b>4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>74.251.200</b>
4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.417.700
4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.833.500
<b>4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.892.358.031</b>
4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.892.358.031
<b>4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>257.687.600</b>
4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.213.200
4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.750.000
4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.120.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.690.000
4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.982.500
4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	51.931.900
4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.000.000
<b>4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.550.142.540</b>
4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224.378.400
4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.325.764.140
<b>4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>215.413.000</b>
4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.953.000
4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.200.000
4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.260.000
<b>4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>33.914.109.560</b>
4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.762.799.560
4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	151.310.000
<b>4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>249.860.000</b>
4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	249.860.000
<b>4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS dan FUNGSI DPRD</b>	<b>24.467.511.220</b>
<b>4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>587.811.900</b>
4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program	59.747.000
4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	328.064.900
4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	200.000.000
<b>4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>916.009.000</b>
4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	271.112.000
4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	271.112.000
4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	148.655.000
4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	148.655.000
4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	76.475.000
<b>4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>815.788.320</b>
4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	510.348.000
4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	224.171.520
4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	81.268.800
<b>4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>2.421.430.000</b>
4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	300.000.000
4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	2.121.430.000
<b>4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>19.726.472.000</b>
4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	19.726.472.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>5.01 PERENCANAAN</b>	<b>10.299.819.363</b>
<b>5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>10.299.819.363</b>
<b>5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.583.331.063</b>
<b>5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25.000.000</b>
5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000
5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000
<b>5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.770.818.241</b>
5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.770.818.241
<b>5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>594.368.600</b>
5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.946.500
5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.910.000
5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.360.000
5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.566.100
5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000
5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	65.186.000
5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.500.000
<b>5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>879.508.522</b>
5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.660.440
5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	688.848.082
<b>5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>313.635.700</b>
5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.676.600
5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.090.000
5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.869.100
<b>5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.452.483.700</b>
<b>5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.305.752.900</b>
5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	74.320.000
5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	36.064.000
5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	601.861.900
5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	593.507.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>94.753.000</b>
5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	94.753.000
<b>5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>51.977.800</b>
5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	51.977.800
<b>5.01.03 PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.264.004.600</b>
<b>5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>378.797.400</b>
5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	152.897.800
5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	214.299.800
5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11.599.800
<b>5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>597.397.200</b>
5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	181.539.200
5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	385.450.000
5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.408.000
<b>5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>287.810.000</b>
5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.610.000
5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	37.200.000
5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000
<b>5.02 KEUANGAN</b>	<b>572.572.579.305</b>
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>559.149.804.253</b>
<b>5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>41.146.880.521</b>
<b>5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>24.735.900</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.335.400
5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.731.300
5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.588.800
5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.080.400
<b>5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>38.776.862.037</b>
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.761.336.037
5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.260.000
5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.266.000
<b>5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>921.765.850</b>
5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.329.800
5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.670.000
5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	181.689.900
5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.810.000
5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	234.821.150
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.445.000
<b>5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.074.800.534</b>
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	293.429.320
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	781.371.214
<b>5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>348.716.200</b>
5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	237.771.200
5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.400.000
5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.550.000
5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.995.000
<b>5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>515.827.933.532</b>
<b>5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.575.054.300</b>
5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	121.716.800
5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	112.627.600
5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	88.319.000
5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	78.319.000
5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	127.322.800



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	127.323.100
5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	200.000.000
5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	719.426.000
<b>5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>355.046.000</b>
5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7.152.900
5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	104.017.900
5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	77.768.500
5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	38.821.300
5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	127.285.400
<b>5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>563.845.300</b>
5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	61.562.700
5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	29.037.900
5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	298.826.000
5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	174.418.700
<b>5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>513.333.987.932</b>
5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	467.311.629.200
5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17.119.242.226
5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	28.903.116.506
<b>5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>2.174.990.200</b>
<b>5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2.174.990.200</b>
5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	91.538.100
5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	30.322.000
5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	278.693.800
5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	1.336.621.300



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	110.900.000
5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	20.008.000
5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	125.864.000
5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	109.292.000
5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	71.751.000
<b>5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>13.422.775.052</b>
<b>5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.072.775.152</b>
<b>5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>73.763.800</b>
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.801.900
5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.961.900
<b>5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.955.545.934</b>
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.955.545.934
<b>5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>604.693.100</b>
5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.989.300
5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.414.000
5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	226.009.800
5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.998.500
5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	51.685.500
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289.596.000
<b>5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.144.993.568</b>
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.999.120
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	869.994.448
<b>5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>293.778.750</b>
5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.356.750
5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.470.000
5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.952.000
<b>5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.349.999.900</b>
<b>5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>2.349.999.900</b>
5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	500.000.000
5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	300.000.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	850.000.000
5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100.000.000
5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	499.999.900
5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100.000.000
<b>5.03 KEPEGAWAIAN</b>	<b>6.301.609.667</b>
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>6.301.609.667</b>
<b>5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.910.106.467</b>
<b>5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>28.289.300</b>
5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.289.300
<b>5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.141.408.967</b>
5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.141.408.967
<b>5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>170.629.200</b>
5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.054.400
5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.948.000
5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.722.200
5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.660.000
5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	20.209.600
5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.035.000
<b>5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>401.955.500</b>
5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.784.400
5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	247.171.100
<b>5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>167.823.500</b>
5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.273.500
5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.200.000
5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.350.000
<b>5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1.391.503.200</b>
<b>5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>250.000.000</b>
5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	200.000.000
5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000
<b>5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>482.386.000</b>
5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	99.378.000
5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	146.735.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	236.273.000
<b>5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>517.000.200</b>
5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	300.000.200
5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	217.000.000
<b>5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>142.117.000</b>
5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3.076.000
5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	55.962.000
5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	46.924.000
5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	36.155.000
<b>5.04 PENDIDIKAN dan PELATIHAN</b>	<b>1.021.878.100</b>
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>1.021.878.100</b>
<b>5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>1.021.878.100</b>
<b>5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>1.021.878.100</b>
5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	1.021.878.100
<b>5.05 PENELITIAN dan PENGEMBANGAN</b>	<b>899.999.900</b>
<b>5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>899.999.900</b>
<b>5.05.02 PROGRAM PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>899.999.900</b>
<b>5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>300.000.000</b>
5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	300.000.000
<b>5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>399.999.900</b>
5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	399.999.900
<b>5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>200.000.000</b>
5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutanan di Bidang Teknologi dan Inovasi	200.000.000
<b>6.01 INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>14.359.016.325</b>
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah</b>	<b>14.359.016.325</b>
<b>6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.798.459.325</b>
<b>6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>75.400.000</b>
6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.400.000
<b>6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.318.854.377</b>
6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.318.854.377
<b>6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>397.160.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	397.160.000
<b>6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>450.311.000</b>
6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.225.000
6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198.500.000
6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.360.000
6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.200.000
6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	78.126.000
6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.900.000
<b>6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>248.037.948</b>
6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.260.040
6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.777.908
<b>6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>308.696.000</b>
6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	245.866.000
6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.550.000
6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.280.000
<b>6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>1.832.565.000</b>
<b>6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>1.410.565.000</b>
6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	230.025.000
6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	326.625.000
6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	277.725.000
6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	7.200.000
6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	318.150.000
6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	250.840.000
<b>6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>422.000.000</b>
6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	34.950.000
6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	387.050.000
<b>6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN dan ASISTENSI</b>	<b>727.992.000</b>
<b>6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>26.720.000</b>
6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	26.720.000
<b>6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>701.272.000</b>
6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	408.872.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8.450.000
6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	245.350.000
6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38.600.000
<b>7.01 KECAMATAN</b>	<b>72.340.972.660</b>
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Rangkasbitung</b>	<b>6.643.647.843</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.408.600.343</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>38.336.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.160.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.176.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.845.412.789</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.845.412.789
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>216.658.030</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.130.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.920.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.822.630
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.640.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	73.145.400
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>187.579.124</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.010.288
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.568.836
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>120.614.400</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.304.400
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.630.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.680.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>81.559.500</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>26.279.500</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26.279.500



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>55.280.000</b>
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	17.200.000
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	38.080.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>67.240.000</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>19.440.000</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.440.000
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>47.800.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	47.800.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>62.040.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>62.040.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	62.040.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>24.208.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>24.208.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.208.000
<b>7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Rangkasbitung Barat</b>	<b>200.000.000</b>
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>200.000.000</b>
<b>7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>200.000.000</b>
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000
<b>7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Muara Ciujung Barat</b>	<b>200.000.000</b>
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>200.000.000</b>
<b>7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>200.000.000</b>
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000
<b>7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Muara Ciujung Timur</b>	<b>200.000.000</b>
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>200.000.000</b>
<b>7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>200.000.000</b>
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000
<b>7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Cijoro Lebak</b>	<b>200.000.000</b>
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>200.000.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>200.000.000</b>
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000
<b>7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Cijoro Pasir</b>	<b>200.000.000</b>
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>200.000.000</b>
<b>7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>200.000.000</b>
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kalanganyar</b>	<b>2.098.574.988</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.968.534.988</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.420.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	620.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.800.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.620.072.788</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.620.072.788
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>76.848.500</b>
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.640.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.249.000
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.879.500
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	17.080.000
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>188.570.200</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.222.000
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.348.200
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.623.500</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.793.500
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.150.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>27.280.000</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>11.000.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.000.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>16.280.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16.280.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>48.840.000</b>
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>48.840.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	48.840.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>52.440.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>52.440.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.440.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.480.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>1.480.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.480.000
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Cibadak</b>	<b>2.580.700.529</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.411.668.529</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>19.020.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.220.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.800.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.913.325.029</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.913.325.029
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>184.233.000</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.000.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.400.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.900.000
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.600.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	27.333.000
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>189.560.500</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.128.000
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.432.500



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>105.530.000</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.770.000
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.760.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.000.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>47.032.000</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>11.900.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.900.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>35.132.000</b>
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.092.000
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	34.040.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>51.800.000</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>7.400.000</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.400.000
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>44.400.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	44.400.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>61.320.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>61.320.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	61.320.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>8.880.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	<b>8.880.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.880.000
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Warunggunung</b>	<b>2.224.982.137</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.082.392.137</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.416.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.616.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.800.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.814.441.627</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.814.441.627
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>55.371.350</b>
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.760.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.265.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	12.396.350
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.950.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>164.820.660</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.507.600
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.313.060
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>33.342.500</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.232.500
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.450.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.660.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>36.540.000</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>15.580.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.580.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>20.960.000</b>
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.960.000
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15.000.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>42.510.000</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>8.140.000</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.140.000
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>34.370.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	34.370.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>48.000.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>48.000.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48.000.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>15.540.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	<b>15.540.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.840.000
7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.700.000
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Cimarga</b>	<b>2.480.462.341</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.257.767.641</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.127.700</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.369.700
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.758.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.910.544.505</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.910.544.505
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>149.157.300</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.520.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.096.800
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.326.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	18.214.500
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>88.535.636</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.088.200
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.447.436
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>104.402.500</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.072.500
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.230.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.100.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>114.159.700</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>26.004.800</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26.004.800
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>88.154.900</b>
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	8.190.000
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.480.000
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	78.484.900
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>25.095.000</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>7.575.000</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.575.000
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>17.520.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	17.520.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>53.640.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>53.640.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	53.640.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>29.800.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	<b>29.800.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.730.000
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.070.000
<b>7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Cikulur</b>	<b>2.782.001.670</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.537.913.670</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.610.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.380.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.230.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.130.576.570</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.130.576.570
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>133.827.800</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.000.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.700.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.400.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	19.727.800
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>148.646.800</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.690.000
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.956.800
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>109.252.500</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.752.500
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.500.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>95.922.000</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>21.045.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.045.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>74.877.000</b>
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.680.000
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.032.000
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	65.165.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>68.020.000</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>11.480.000</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.480.000
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>56.540.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	56.540.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>54.216.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>54.216.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	54.216.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>25.930.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	<b>25.930.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.450.000
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.480.000
<b>7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Leuwidamar</b>	<b>2.204.004.843</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.039.038.843</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>30.440.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.508.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.932.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.790.963.369</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.790.963.369
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>109.926.900</b>
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.989.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.190.700
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	22.747.200
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56.371.274</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.676.750
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.694.524
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>51.337.300</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.831.300
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.410.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.096.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>71.830.000</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>23.866.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.866.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>47.964.000</b>
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.650.000
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.336.000
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	41.978.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>25.980.000</b>
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>25.980.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	25.980.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>52.380.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>52.380.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.380.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>14.776.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	<b>14.776.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.936.000
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.840.000
<b>7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sajira</b>	<b>2.673.000.445</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.537.076.045</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.592.800</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.166.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.426.800
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.182.904.585</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.182.904.585
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>158.607.800</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.400.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.080.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.147.800



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.808.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	16.172.000
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>130.945.360</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.318.300
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.627.060
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>41.025.500</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.505.500
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.600.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>48.355.200</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>14.536.200</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.536.200
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>33.819.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	33.819.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>31.820.000</b>
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>31.820.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	31.820.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>48.000.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>48.000.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48.000.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>7.749.200</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	<b>7.749.200</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.749.200
<b>7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Maja</b>	<b>2.620.718.491</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.403.275.391</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11.618.900</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.765.900
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.853.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.133.056.291</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.133.056.291
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>89.602.600</b>
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.044.050
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.728.500
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	31.830.050
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.852.600</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.663.000
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.189.600
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>108.145.000</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.225.000
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.420.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.500.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>82.310.700</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>27.680.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27.680.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>54.630.700</b>
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.240.200
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	47.390.500
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>53.752.400</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>14.332.400</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.332.400



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>39.420.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	39.420.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>52.380.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>52.380.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.380.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>29.000.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	<b>29.000.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.700.000
7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.300.000
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Curugbitung</b>	<b>2.574.272.983</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.497.020.683</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.420.400</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.311.500
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.108.900
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.283.650.473</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.283.650.473
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>47.715.200</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.060.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.168.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.358.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	14.129.200
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>118.650.510</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.191.000
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.459.510
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>34.584.100</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.930.100
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.150.000
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.504.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>23.506.000</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>9.243.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.243.000
<b>7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>5.538.000</b>
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.538.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>8.725.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8.725.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>8.484.500</b>
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>8.484.500</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	8.484.500
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>39.525.500</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>39.525.500</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	39.525.500
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>5.736.300</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	<b>5.736.300</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.035.600
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	700.700
<b>7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Muncang</b>	<b>2.133.098.941</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.863.133.341</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>37.032.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.212.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.820.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.497.433.405</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.497.433.405
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>157.120.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.940.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.000.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	47.100.000
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.080.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>96.821.936</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.699.600
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.122.336
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>74.726.000</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.554.000
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.072.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>87.245.600</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>40.364.400</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40.364.400
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>46.881.200</b>
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.189.200
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	7.827.000
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	31.865.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>99.600.000</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>35.500.000</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.500.000
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>64.100.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	64.100.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>52.440.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>52.440.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.440.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>30.680.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	<b>30.680.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.500.000
7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.180.000
<b>7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Sobang</b>	<b>2.161.797.452</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.869.241.852</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>62.153.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.125.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.028.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.480.047.692</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.480.047.692
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>89.022.350</b>
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.535.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.491.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	26.116.350
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.880.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>167.666.110</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.905.000
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.761.110
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>70.352.700</b>
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.278.700
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.440.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.634.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>138.421.500</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>21.995.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.995.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>116.426.500</b>
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.460.000
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.416.500
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	113.550.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>73.916.100</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>28.576.100</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.576.100
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>45.340.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	45.340.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>51.650.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>51.650.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	51.650.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>28.568.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	<b>28.568.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.568.000
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.000.000
<b>7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Bojongmanik</b>	<b>2.454.835.010</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.304.265.010</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>47.400.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.000.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.400.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.855.235.010</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.855.235.010
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>202.211.000</b>
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.650.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.540.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	12.971.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.050.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>123.934.000</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.906.000
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.028.000
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>75.485.000</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.095.000
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.400.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>42.630.000</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>14.420.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.420.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>28.210.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	28.210.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>45.140.000</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>15.540.000</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.540.000
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>29.600.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	29.600.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>52.440.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>52.440.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.440.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>10.360.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	<b>10.360.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.360.000
<b>7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Cirinten</b>	<b>2.490.582.124</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.336.922.124</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>35.291.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.538.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.753.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.942.153.536</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.942.153.536
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>183.579.800</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.500.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.968.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.360.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	24.751.800
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>102.682.788</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.877.840
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.804.948
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>73.215.000</b>
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.295.000
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.240.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>55.340.000</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>19.120.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.120.000
<b>7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>3.330.000</b>
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.330.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>32.890.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	32.890.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>34.040.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.03.2.03 PEMBERDAYAAN Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>34.040.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	34.040.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>52.440.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>52.440.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.440.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.840.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	<b>11.840.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.840.000
<b>7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Cipanas</b>	<b>2.260.721.068</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.097.201.068</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>20.550.900</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.800.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.750.900
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.807.115.870</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.807.115.870
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>123.621.400</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.650.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.420.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.305.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	18.246.400
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>95.193.998</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.429.600
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.764.398
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>50.718.900</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.078.900
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.480.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.160.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>51.860.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>22.260.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.770.000
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.490.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>29.600.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29.600.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>53.280.000</b>
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>53.280.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	53.280.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>52.440.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>52.440.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.440.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>5.940.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi</b>	<b>5.940.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.940.000
<b>7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Lebakgedong</b>	<b>1.960.135.498</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.803.278.498</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>26.528.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.818.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.710.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.454.234.118</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.454.234.118
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>138.480.200</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.560.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.547.300
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.212.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	11.760.900



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.400.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>148.666.680</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.920.720
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.745.960
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35.369.500</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.763.000
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.686.500
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>69.487.000</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>13.107.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.107.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>56.380.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	56.380.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>32.010.000</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>5.370.000</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.370.000
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>26.640.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	26.640.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>48.000.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>48.000.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48.000.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>7.360.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>7.360.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.360.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Gunungkencana</b>	<b>2.424.292.517</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.247.253.517</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.493.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.863.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.630.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.772.463.945</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.772.463.945
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>130.489.400</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.100.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.560.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.870.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	22.959.400
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>191.502.672</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.507.800
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.994.872
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>116.304.500</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.028.500
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.580.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.696.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>62.439.000</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>26.229.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26.229.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>36.210.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36.210.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>43.660.000</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>8.140.000</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.140.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>35.520.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	35.520.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>52.440.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>52.440.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.440.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>18.500.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>18.500.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.500.000
<b>7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Cileles</b>	<b>2.786.186.897</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.596.032.897</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>38.918.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.928.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.990.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.267.044.649</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.267.044.649
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100.292.000</b>
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.640.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.700.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	15.952.000
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>102.426.248</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.238.000
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.188.248
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>87.352.000</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.950.000
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.210.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.192.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>68.974.000</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>19.240.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.240.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>49.734.000</b>
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.144.000
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	45.590.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>54.140.000</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>14.740.000</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.740.000
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>39.400.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	39.400.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>52.440.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>52.440.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.440.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>14.600.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>14.600.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.240.000
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.360.000
<b>7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Banjarsari</b>	<b>2.701.324.689</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.518.681.289</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>22.020.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.820.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.200.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.101.139.017</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.101.139.017
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>178.670.800</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.500.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.540.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.825.000
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.950.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	24.695.800
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.160.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>147.869.472</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.616.000
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.253.472
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>68.982.000</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.982.000
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.800.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>53.738.400</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>22.058.400</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.058.400
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>31.680.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	31.680.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>75.785.000</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>10.655.000</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.655.000
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>65.130.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	65.130.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>35.500.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>35.500.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	35.500.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>17.620.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>17.620.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.620.000
<b>7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Cijaku</b>	<b>2.402.093.137</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.261.951.137</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>16.530.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.330.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.200.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.950.745.753</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.950.745.753
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>71.921.700</b>
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.760.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.945.500
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	13.216.200
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>174.906.184</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.730.000
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.176.184
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>47.847.500</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.387.500
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.260.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.200.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>48.252.000</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>21.700.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.700.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>26.552.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	26.552.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>29.100.000</b>
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>29.100.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	29.100.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>48.000.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>48.000.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48.000.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>14.790.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>14.790.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.190.000
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.600.000
<b>7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Cigemblong</b>	<b>2.234.557.210</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.051.097.210</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>32.933.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.134.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.799.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.613.657.638</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.613.657.638
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>163.953.600</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.600.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.520.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.600.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	14.233.600
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>167.335.472</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.404.000
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.931.472
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>73.217.500</b>
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.857.500



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.680.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>66.640.000</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>24.280.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.280.000
<b>7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>3.700.000</b>
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.700.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>38.660.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	38.660.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>53.280.000</b>
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>53.280.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	53.280.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>52.440.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>52.440.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.440.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.100.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.100.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.100.000
<b>7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Malingping</b>	<b>2.358.191.801</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.232.206.001</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>21.493.500</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.006.900
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.486.600
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.899.872.809</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.899.872.809
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>126.980.500</b>
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.448.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.677.000
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.976.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	16.879.500
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>148.710.992</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.731.420
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.979.572
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35.148.200</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.944.200
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.104.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>58.512.200</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>11.719.200</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.709.200
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.010.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>46.793.000</b>
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.729.900
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.910.800
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	43.152.300
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>8.765.800</b>
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>8.765.800</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	8.765.800
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>52.379.900</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>52.379.900</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.379.900
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>6.327.900</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>6.327.900</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.867.900
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.460.000
<b>7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Wanasalam</b>	<b>2.272.945.691</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.128.002.991</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>61.147.500</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.185.800
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.961.700
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.731.674.543</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.731.674.543
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>129.024.700</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.064.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.749.400
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	13.111.300
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.100.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>130.766.248</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.379.100
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.387.148
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>75.390.000</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.066.000
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.224.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>63.315.300</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>18.649.300</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.649.300
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>44.666.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	44.666.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>18.384.000</b>
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>18.384.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	18.384.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>52.440.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>52.440.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.440.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>10.803.400</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>10.803.400</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.363.400
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.440.000
<b>7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Panggarangan</b>	<b>2.113.100.361</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.937.180.361</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>28.779.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.722.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.057.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.567.718.401</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.567.718.401
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>131.448.000</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.000.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.200.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.300.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	20.988.000
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.960.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>125.667.960</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.458.000
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.209.960
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>83.567.000</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.607.000
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.600.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>55.700.000</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>21.560.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.560.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>34.140.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	34.140.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>48.200.000</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>8.420.000</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.420.000
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>39.780.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	39.780.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>52.440.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>52.440.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.440.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>19.580.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>19.580.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.880.000
7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.700.000
<b>7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Cihara</b>	<b>2.548.561.468</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.410.701.468</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25.158.400</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.401.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.757.400
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.927.457.272</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.927.457.272
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>130.118.800</b>
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.080.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.633.200
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.365.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	22.040.600
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>230.818.496</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.350.000
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.468.496
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>97.148.500</b>
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.677.500
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.390.000
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.081.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>51.380.000</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>15.330.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.330.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>36.050.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36.050.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>22.200.000</b>
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>22.200.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	22.200.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>52.440.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>52.440.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.440.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.840.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.840.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.840.000
<b>7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Bayah</b>	<b>2.500.428.352</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.311.158.232</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>28.555.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.370.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.185.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.914.395.960</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.914.395.960
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>135.502.600</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.000.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.640.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.408.400
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	21.454.200
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>166.257.172</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.790.700
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.466.472
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>66.447.500</b>
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.747.500
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.650.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.050.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>52.901.800</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>14.961.800</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.961.800
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>37.940.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	37.940.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>59.958.320</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>19.258.320</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.258.320
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>40.700.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	40.700.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>52.440.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>52.440.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.440.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>23.970.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>23.970.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.970.000
7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.000.000
<b>7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Cibeber</b>	<b>2.653.793.739</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.488.589.539</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>19.780.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.420.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.360.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.047.185.967</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.047.185.967
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>153.998.600</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.000.000
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.750.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.750.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	21.418.600



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.080.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>192.405.122</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.926.150
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.478.972
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>75.219.850</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.979.850
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.140.000
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.100.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>61.891.100</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>30.433.100</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.433.100
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>31.458.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	31.458.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>40.770.000</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>6.730.000</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.730.000
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>34.040.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	34.040.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>50.590.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>50.590.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.590.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11.953.100</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11.953.100</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.953.100



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Cilograng</b>	<b>2.001.960.435</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.851.954.435</b>
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>26.452.000</b>
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.588.000
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.864.000
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.439.378.239</b>
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.439.378.239
<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>102.347.800</b>
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	986.800
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.760.000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.370.000
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	25.231.000
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.000.000
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>217.412.396</b>
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.011.600
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.400.796
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>66.364.000</b>
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.804.000
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.560.000
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.000.000
<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>54.234.000</b>
<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>22.554.000</b>
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.554.000
<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>31.680.000</b>
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	31.680.000
<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>44.070.000</b>
<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>5.010.000</b>
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.010.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>39.060.000</b>
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	39.060.000
<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>48.000.000</b>
<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>48.000.000</b>
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48.000.000
<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>3.702.000</b>
<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>3.702.000</b>
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.702.000
<b>8.01 KESATUAN BANGSA dan POLITIK</b>	<b>8.767.639.070</b>
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>8.767.639.070</b>
<b>8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.193.885.070</b>
<b>8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>97.694.000</b>
8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.630.000
8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.064.000
<b>8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.363.793.254</b>
8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.363.793.254
<b>8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>211.766.900</b>
8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.548.000
8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.980.000
8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.424.000
8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000
8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.982.500
8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	32.782.400
8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.050.000
<b>8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>312.362.166</b>
8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.913.520
8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.448.646
<b>8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>208.268.750</b>



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.406.750
8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.860.000
8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.002.000
<b>8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA dan KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>1.702.704.000</b>
<b>8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>1.702.704.000</b>
8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000.000
8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.627.704.000
8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	25.000.000
<b>8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK dan LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK dan PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>2.671.050.000</b>
<b>8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>2.671.050.000</b>
8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.671.050.000
<b>8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN dan PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>400.000.000</b>
<b>8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>400.000.000</b>
8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000
8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250.000.000
8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
<b>8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN dan PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, dan BUDAYA</b>	<b>400.000.000</b>
<b>8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>400.000.000</b>
8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400.000.000
<b>8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL dan PENINGKATAN KUALITAS dan FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>400.000.000</b>
<b>8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>400.000.000</b>
8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400.000.000
<b>Total</b>	<b>2.257.418.399.284</b>





### 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer

**Tabel 4.3**  
**Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja**

Kode	Uraian	Plafon Anggaran (Rp.)
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.257.418.399.284</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.602.463.840.516</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.144.909.871.490
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.569.876.126
5.1.05	Belanja Hibah	21.422.492.900
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.092.800.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>141.620.570.836</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.613.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.393.774.968
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.773.304.718
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.283.891.150
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.400.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>17.119.242.226</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.119.242.226
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>496.214.745.706</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	28.903.116.506
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	467.311.629.200
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.257.418.399.284</b>

Alokasi belanja pegawai Tahun 2025 sebesar Rp.1.144.909.871.490,- diutamakan untuk membayar gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Formasi CPNS dan Formasi P3K pengadaan tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen), jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah,



pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN, tambahan penghasilan kepada pegawai ASN, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya dan Penganggaran honorarium dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta untuk Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp55.682.184.704,- .

Alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp.430.569.876.126,- yang dibayarkan untuk belanja barang sebesar Rp.36.564.916.579,- belanja jasa sebesar Rp.145.952.392.531,- belanja pemeliharaan sebesar Rp.18.398.975.762,- belanja perjalanan dinas sebesar Rp.55.193.210.000,- Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.2.715.625.000,- serta Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.171.754.756.254,-

Sementara Alokasi belanja hibah pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.21.422.492.900,- yang terdiri dari belanja hibah uang, belanja hibah barang dan Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Belanja hibah tersebut diperuntukan Bagi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kab. Lebak; Badan Narkotika (BNK) Kab. Lebak; Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Lebak; Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA) Kab. Lebak; Forum Koordinasi Pencegahan Torirsme (FKPT) Kab. Lebak; Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kab. Lebak; Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab. Lebak; Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Lebak; KONI Kab. Lebak; KORMI Kab. Lebak; National Paralympic Committee Indonesia (NPC) Kab. Lebak; Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lebak; Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD); PMI Kab. Lebak; Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Multatuli FM Kab. Lebak; DEKOPINDA Kab. Lebak;



Komando Distrik Militer (KODIM) 0603 Lebak; Forum Mahasiswa Berprestasi; Dewan Pendidikan Kabupaten Lebak; Forum Mahasiswa Kedokteran; Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Lebak; Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kab. Lebak; BAZNAS Kab. Lebak; Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kab. Lebak; Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kab. Lebak; Forum Komunikasi Magrib Mengaji (FKGMM) Kab. Lebak; ; Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kabupaten Lebak; Kelompok Usaha Bersama (KUB); Kelompok Tani; Kelompok Swadayaan Masyarakat (KSM) dan Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Sedangkan alokasi belanja bantuan sosial pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.6.092.800.000,- yang dianggarkan untuk Bantuan Sosial Program Lebak Sejahtera, Bantuan Sosial Bagi Janda Perintis Kemerdekaan, serta Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki.

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp.141.089.370.836,- yang terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp.6.613.000.000,-, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.56.393.774.968,-, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.39.773.304.718,-, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.38.283.891.150,-, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.25.400.000,-.

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp.17.119.242.226,- untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Transfer Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp.496.214.745.706,- ditujukan bagi pemerintahan desa dalam bentuk komponen Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.264.894.94.167,- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.2.413.622.339,- dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.347.405.643.000,-



serta Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.119.905.986.200,-





## BAB V

### RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian, yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila APBD diperkirakan **defisit**, maka dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara apabila APBD diperkirakan **surplus**, maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan Modal (investasi) daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;



- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lebak tidak mengalokasikan atas penerimaan pembiayaan

Sementara kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan kepada esensi kebutuhan yang mendesak dan wajib. Dengan mempertimbangkan keuangan daerah, maka estimasi rencana pengeluaran pembiayaan Tahun 2025 tidak mengalokasikan.

Selengkapnya terkait pembiayaan daerah yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, baik penerimaan pembiayaan daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
**Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan**  
**Tahun Anggaran 2025**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>0</b>



## BAB VI PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lebak Tahun 2025 merupakan dokumen operasional dari Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 yang berisikan program/kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk masing-masing urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan/sub kegiatan yang disepakati menjadi petunjuk dan ketentuan umum dengan substansi meliputi target anggaran pendapatan daerah, rencana belanja daerah, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Dokumen PPAS yang disepakati nantinya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dan akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada PPAS, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Bupati Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA.2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD TA.2025.

Rangkasbitung, 01 Agustus 2024

**Pj. BUPATI LEBAK,**

**IWAN KURNIAWAN, S.T., M.M.**